

Perempuan dalam Pusaran Teror

Laporan Investigasi Kekerasan Seksual
selama Darurat Sipil dan Militer di Aceh

11/23/2020

Kata Pengantar

Alhamdulillah Rabb al Alamiin. Rampung juga laporan Investigasi Kekerasan Seksual semasa paruh terakhir konflik di Aceh.

Tiga puluh tahun Aceh bergolak dalam peristiwa yang dikenal dengan sebutan “Konflik Aceh”. Lembaga-lembaga hak asasi manusia mencatat berbagai pelanggaran, yang dilakukan baik oleh aparat militer mau pun Gerakan Aceh Merdeka. Dari sekian banyak pelanggaran, kekerasan seksual merupakan yang paling kompleks. Dimensi berlapis yang dimiliki kejahatan seksual membuatnya sulit untuk direkam dengan seimbang.

Laporan investigasi ini merupakan salah satu upaya untuk merekam kejahatan seksual semasa konflik Aceh sebagai sebuah pelanggaran HAM.

Kendala terbesar dari pelaksanaan investigasi ini adalah kenyataan bahwa waktu antara peristiwa dengan upaya pengusutan telah berlalu sangat lama. Ingatan para korban, saksi, bahkan saksi bisu berupa bangunan pos, kolam-kolam penyiksaan atau rute yang diambil militer saat masuk ke sebuah dusun, sebagian besar sudah lenyap digerus masa.

Waktu juga menentukan seberapa banyak detail peristiwa yang bisa diselusuri. Sebuah investigasi yang menyeluruh membutuhkan cukup waktu untuk menelusuri setiap petunjuk yang ada di lapangan. Pada investigasi ini, waktu yang tersedia tidak leluasa untuk melakukan hal tersebut.

Namun dari apa yang tersisa, harus diambil intisari kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut. Meski pun jauh dari sempurna, investigasi ini berusaha menyingkap detail renik yang mungkin berguna untuk mendekatkan korban pada haknya.

Tim Investigator ingin mengucapkan terima kasih, acungan jempol bagi Ibu Badriyah dari RPUK (Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan), yang dengan dedikasi serta ingatannya telah sangat membantu Tim menyusuri kembali peristiwa-peristiwa pahit pada dua puluh tahun berselang. Terima kasih kami ucapkan pada Ibu Nurjubah dari JaRI (Jaringan Relawan Indonesia), yang selalu bersedia kami ganggu dengan daftar pertanyaan yang tak habis-habis. Pada para informan, Pak Zulkifli, Mulyadi, Fazir, juga mereka yang enggan disebut, terima kasih; juga bagi Mellyan Cutkeumala Nyakman, M.Ag dan Ulfa Khairina, MA, tanpa anda sekalian informasi yang diperoleh Tim akan

tidak lengkap. Kepada Ibu Khairani Arifin, SH, M.Hum, terima kasih yang tidak bisa dihitung dari kami, atas ilmu, waktu, diskusi dan juga keramahan yang diterima Tim.

Tak lupa Tim ucapkan penghargaan tak terhingga pada Komisioner KKR Aceh Ibu Ainal Mardhiah, yang mendampingi Tim pada bagian awal investigasi, dan tak lelah mengawal proses investigasi hingga akhir.

Akhirnya, Tim mengucapkan milyaran terima kasih, disertai permintaan maaf, pada teman hidup serta para zuriyah, yang bersedia membagi istri dan ibu mereka dengan kebenaran kemanusiaan yang harus diungkap.

Semoga laporan ini dapat menyumbang kegunaan yang berarti.

Banda Aceh, November 2020

Tim Investigator

DAFTAR ISI

I. Pendahuluan

II. Metodologi, Waktu dan Narasumber

III. Proses Investigasi

A. Persiapan, Penelusuran Awal dan FGD

B. Pelaksanaan investigasi

1. Kabupaten Aceh Besar

2. Kabupaten Pidie

3. Kabupaten Aceh Utara

IV. Telusuri Fakta, Selidiki Peristiwa

a. Kesaksian korban

b. Operasi Militer, Sebaran Wilayah Peristiwa dan Titik Pos Militer

c. Sikap masyarakat Blang Pandak dan pengaruhnya pada sikap dan pandangan hidup korban

d. Alat teror

e. Dampak Peristiwa Kekerasan Seksual pada Korban, keluarga, dan masyarakat sekitarnya

f. Up date kondisi korban pada saat investigasi

V. Penutup

I. Pendahuluan

Republik Indonesia adalah salah satu negara yang menandatangani kesepakatan CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Discrimination against Women*) pada 24 Juli 1984, dan meratifikasinya melalui UU RI nomor 7 Tahun 1984 tentang *Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita*.

Konvensi ini mendefinisikan prinsip-prinsip tentang hak asasi perempuan sebagai Hak Asasi Manusia (HAM), norma-norma dan standar-standar kewajiban serta tanggung jawab negara dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Komite CEDAW sudah melahirkan 34 rekomendasi umum, dan isu yang diangkat antara lain adalah Kekerasan Terhadap Perempuan (GR 12 dan 19), Perempuan dalam konteks konflik (GR 30) dan Perempuan Pedesaan (GR 34).¹

Sebagai tanggung jawab atas disahkannya UU no 7/1984 ini, Pemerintah Indonesia diwajibkan melaksanakan butir-butir yang termaktub dalam CEDAW, juga rekomendasi yang diberikan.

Terkait konflik bersenjata di Aceh, perempuan dan anak-anak adalah korban yang amat sedikit mendapat jatah perhatian. Padahal sesungguhnya mereka adalah kaum yang paling keras dihantam kekejaman konflik. Terutama perempuan di wilayah yang dikategorikan sebagai daerah hitam oleh ABRI (TNI/Polri) selama rentang waktu 1989-2005.

KKR Aceh dalam kerja-kerjanya menghimpun fakta dan informasi tentang kekerasan yang dialami perempuan selama konflik Aceh, melakukan berbagai ikhtiar untuk menjemput pernyataan korban. Kini dokumen peristiwa yang dialami para korban telah ada di pangkalan data KKR Aceh. Baik dilakukan sendiri dengan cara pengambilan pernyataan, juga menerima submisi dari berbagai lembaga mitra yang selama ini telah mendokumentasi peristiwa pelanggaran HAM di Aceh.

Guna mendalami peristiwa-peristiwa tersebut dan agar memperoleh gambaran yang lebih lengkap, KKR Aceh menunjuk tim investigator (untuk selanjutnya disebut Tim) yang bertugas sesuai mandat dari KKR Aceh.

¹ Lihat <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-komnas-perempuan-catatan-komnas-perempuan-33-tahun-ratifikasi-konvensi-cedaw-di-indonesia> diakses pada 20 November 2020

Apa pun tantangan yang dilalui TIM (seperti waktu yang sangat terbatas untuk menyelidiki lebih dalam setiap fakta yang ditemukan, serta terbatasnya akses Tim ke lingkungan terdekat korban dan juga terduga pelaku), diharapkan temuan Tim ini dapat digunakan untuk sedikit melengkapi laporan akhir KKR Aceh.

II. Metodologi, Waktu, Narasumber

Investigasi ini dilakukan Tim dengan metode dan teknik wawancara mendalam, observasi lapangan, serta telaah pustaka yang relevan dengan isu yang diminta KKR Aceh: Kekerasan Seksual.

Sedari mula KKR Aceh menetapkan dua narasumber utama untuk diwawancara Tim di Lhokseumawe. Mereka wakil dari lembaga mitra yang memberikan submisi dokumen ihwal KS ke KKR Aceh. Dua srikandi yang selama ini mendampingi korban itu adalah Ibu Nurjubah dari Jaringan Relawan Indonesia (JaRI) dan Ibu Badriyah Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RPuK). Tak ada korban di Aceh Utara yang dapat diakses oleh Tim. Narasi dan peristiwa yang dialami korban untuk laporan ini dari Aceh Utara berasal dari submisi dan pangkalan data KKR Aceh.

Bagi korban yang bersedia untuk dikunjungi, maka Tim berupaya bersilaturahmi dan mewawancarai mereka. Yang bersedia ditemui adalah para korban di Pidie. Tim juga berbincang dengan Keuchik serta informan yang memberikan fakta dan pandangan menarik, memperkaya pemahaman Tim tentang lingkup peristiwa kekerasan seksual yang dialami para korban. Ada pun wawancara dengan akademisi dilakukan untuk meyakinkan Tim atas temuan lapangan dan sumber sekunder.

Mulanya penelusuran ke lapangan disepakati pada Agustus-September 2020. Tapi karena Pandemi Covid 19, maka waktunya pun menjulur hingga Oktober/November 2020. Penulisan dilakukan pada pertengahan November 2020.

III. Pelaksanaan Investigasi

A. Persiapan, Penelusuran Awal dan FGD

Proses awal investigasi berupa penyusunan rencana investigasi oleh Tim Investigasi (untuk selanjutnya disebut Tim), membuahkkan rencana kerangka laporan investigasi. Kerangka laporan tersebut kemudian didiskusikan Tim dengan Pokja Perempuan KKR Aceh. Hasilnya disepakati kerangka investigasi.²

² Lihat Rencana Desain Riset Kekerasan Seksual KKR Aceh, Juli 2020

KKR memutuskan agar Tim memakai metode *cluster sampling* dalam pengambilan sampel penelitian yang dibincangkan dalam beberapa kali pertemuan dengan Pokja Perempuan. Teknik pengambilan sampel ini digunakan bilamana populasi tidak terdiri dari individu-individu melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau *kluster*.

Dengan metode ini, informasi awal mengenai korban Kekerasan Seksual (seterusnya disebut KS) pada masa konflik di Aceh dari pangkalan data KKR Aceh dipilah menurut wilayah peristiwa (*cluster*) dan diverifikasi dan diklasifikasi oleh anggota Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan KKR Aceh. Kemudian KKR Aceh menetapkan Kabupaten Aceh Utara, Pidie, dan Aceh Besar sebagai tiga kelompok wilayah yang harus ditelaah TIM. Alasannya, menurut Ketua Pokja Perempuan KKR Aceh, Ainal Mardhiah, karena para korban di Aceh Utara, Pidie dan Aceh Besar telah memiliki pendamping. Wilayah lain sengaja dikesampingkan dari kluster yang diinvestigasi kali ini. Meski pun peristiwa KS juga ada di daerah tersebut.³

Metode *cluster sampling* dilaksanakan dengan *systematic cluster sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi, yang telah dipilah dan diberi nomor urut. Dalam hal ini sampel yang diambil sudah diberi nomor dan telah diverifikasi lebih dulu sebagai responden oleh Pokja Perempuan KKR Aceh.

Tim dibekali daftar dan narasi pernyataan korban (responden) di Aceh Besar (tiga korban); di Aceh Utara (16 korban); dan dari Pidie (11 korban). Kemudian Tim menelaah informasi awal berupa narasi kesaksian korban dari pangkalan data KKR Aceh. Kajian awal ini kemudian diperkaya dengan bahan bacaan yang dikumpulkan Tim dari berbagai sumber.

Tim juga menelusuri lagi kesaksian para korban di Aceh Besar. Tiga korban bersedia diwawancarai oleh Tim di Montasik dan Kuta Baro dan dilaksanakan pada Jumat, 26 Agustus 2020. Hasil kesaksian dari Aceh Besar ini juga dijadikan laporan awal untuk dipaparkan pada FGD yang diadakan di Ruang Simpang KKA Kantor KKR Aceh, pada Jumat 18 September 2020. FGD dihadiri perwakilan dari (RPuK, JaRI, AJAR, PKBI, dll).

KKR Aceh bersepakat FGD mengubah kerangka awal yang semula diminta KKR Aceh kepada Tim. Kerangka awal berupa “desain riset” disesuaikan menjadi kerangka

³ Tim menilai penting menyertakan peristiwa terkait KS dari Aceh Jaya secara ringkas di laporan ini.

laporan investigasi. Elemen yang tidak digunakan dalam laporan ini adalah analisa terhadap data dan informasi yang ditemukan di lapangan, sesuai arahan kesimpulan FGD dan menjadi keputusan KKR Aceh yang harus dilaksanakan Tim.

FGD juga menghasilkan kesimpulan bahwa diperlukan suatu definisi yang jelas tentang kekerasan seksual. Untuk investigasi ini, yang digunakan adalah identifikasi bentuk kekerasan sosial oleh Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan mengidentifikasi adanya 15 (lima belas) bentuk Kekerasan Seksual (KS) yang terjadi dalam berbagai konteks sebagai berikut:

1. Perkosaan
2. Pelecehan seksual
3. Eksploitasi seksual
4. Penyiksaan seksual
5. Perbudakan seksual
6. Intimidasi, ancaman dan percobaan perkosaan
7. Prostitusi paksa
8. Pemaksaan kehamilan
9. Pemaksaan aborsi
10. Pemaksaan perkawinan
11. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual
12. Kontrol seksual seperti pemaksaan busana dan diskriminasi perempuan lewat aturan
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan perempuan, dan
15. Pemaksaan sterilisasi/kontrasepsi

Berdasarkan bentuk identifikasi itu, Tim menelusuri berbagai informasi dan menyibak fakta terkait untuk laporan ini. Fakta dan informasi yang dikumpulkan Tim diperoleh melalui pangkalan data KKR Aceh mau pun dari wawancara yang dilakukan Tim. Untuk keperluan penyusunan laporan ini, fakta tersebut dikelompokkan secara tematik, dimulai dari peristiwa yang acap muncul dalam kesaksian korban.

Penelusuran Tim ke Kabupaten Pidie pada 26-29 September 2020 dan Aceh Utara pada 18-20 Oktober 2020.

KKR Aceh telah menentukan narasumber utama yang harus dihubungi Tim, tanpa harus melibatkan korban di Aceh Utara. Tim juga mengupayakan narasumber lainnya serta informan yang dapat memberikan fakta dan informasi pendukung yang relevan. Tim berikhtiar mengobservasi wilayah sekitar korban dan lokasi kejadian, menelusuri bentang alam, menemukan situs dan mengupayakan rekonstruksi titik-titik pos aparat, di kawasan yang patut diduga sebagai lokasi peristiwa KS.

B. Pelaksanaan investigasi

1. Aceh Besar

Aceh Besar dikunjungi Tim pada 25 Agustus 2020 pukul 11.00-17.00 WIB. Tim dapat menemui ketiga korban yang telah diambil pernyataan dan kesaksiannya oleh KKR Aceh. Korban masing-masing adalah ANDR, ERL dan WNTA.

Para korban ditemui secara terpisah di rumah masing-masing. Mereka bersedia mengungkapkan kronologi kekerasan seksual yang dialami pada rentang waktu 2002-2003. Hampir seluruh fakta yang disampaikan mereka bersesuaian dengan yang dinyatakannya ketika pengambilan pernyataan oleh KKR Aceh.

Kabupaten Aceh Besar yang batas-batasnya bersinggungan langsung bahkan lebur dengan Ibu Kota Propinsi, Banda Aceh, dikenal sebagai daerah basis perlawanan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Beberapa wilayah hutan dan perbukitan di Kabupaten ini, Siron misalnya, adalah situs lokasi latihan pasukan GAM. Sayap perempuan GAM, Inong Balee, juga dilatih di sini. Hutan yang masih lebat, kontur tanah yang naik turun, menciptakan benteng alam bagi pasukan yang pada masa awalnya disebut Gerakan Pengacau Keamanan Aceh oleh Pemerintah.

Gampong dan dusun ketiga korban yang disambangi Tim di Aceh Besar, terletak di urat nadi gerakan GAM. Letaknya yang sangat dekat dengan Banda Aceh membuat markas-markas GAM di seputar Aceh Besar memiliki posisi vital dalam peta perlawanan GAM.

Saat Tim memasuki gampong para korban, ciri khas pertama yang dapat diamati adalah vegetasi yang masih cukup rimbun. Terutama di Montasik, dimana persawahan dan hutan gemunung menampilkan panorama klasik tropik, membuat orang terkejut, karena letaknya yang sebenarnya sangat dekat dengan hiruk pikuk Banda Aceh.

Pada paruh terakhir konflik Aceh, rakyat Aceh Besar merasakan dan menyaksikan panasnya peperangan. Ada empat komando daerah (sagoe) di sini, semua saling terhubung dengan jalan rahasia yang disebut pers sebagai "jalan tikus". Jaringan ini saling mendukung.

Menurut mantan jubi GAM Aceh Rayeuk, Irwansyah alias Tgk Muchsalmina pada *Acehkini* dalam kumparan.com, Daerah 26 di Aceh besar memiliki tiga kamp di Utara, tengah dan Selatan. Kamp Pinto Raya, Tameh Teungeh dan Pinto Angen, yang letaknya tak terlalu berjauhan. Komando Daerah 22 dibawah pimpinan Tgk Akhyar meliputi Montasik, Jantho, Lembah Seulawah hingga ke Saree. Tgk Muharram bertanggung jawab atas Daerah 25, meliputi Sibreh, Lambadeuk, Lhoong, perbatasan Aceh Jaya, dan Kutaraja dan sekitarnya.⁴

Bertahan dalam kondisi alam hutan hujan tropis yang lembab terbukti berat. Tertular malaria bukannya hal baru. Seperti yang dialami oleh suami ANDR, yang meninggal di pegunungan Siron karena malaria. Penuturan para korban kemudian memperjelas bagaimana kondisi di Aceh Besar pada masa itu.

2. Kabupaten Pidie

2.a. Blang Pandak, Tangse

Penelusuran ke Gampong Blang Pandak, Tangse dilakukan Tim pada 27 September 2020. Didampingi seorang informan (Pak Zulkifli), Tim menuju Gampong Blang Pandak. Tujuan pertama adalah rumah Keuchik Blang Pandak, Tgk Banta Lida. Dia adalah Keuchik definitif pertama (dikukuhkan tahun 2017) setelah Keuchik lama (Keuchik Raban), dikabarkan bersembunyi masuk hutan. Ada dugaan bahwa ia “masuk hutan” karena gagal memenuhi janjinya pada warga Blang Pandak ihwal pemekaran wilayah.⁵

Gampong Blang Pandak berada di sebuah lembah berbentuk memanjang, dikelilingi perbukitan yang oleh warga setempat disebut gunung. Antara lain gunung Halimon, gunung Lheuhop dan gunung Peut Sagoe. Keberadaan gugusan gunung ini seolah jadi benteng alami yang memisahkan Blang Pandak dengan wilayah lain di Kecamatan Tangse. Salah seorang korban KS, ibu HLM binti PT, menyebut bahwa tinggal di Blang Pandak itu: “*Seperti tinggal dalam kuali.*”

Kondisi geografis seperti itu menyebabkan Blang Pandak mengalami kelambatan dalam memperoleh akses pada pengembangan pembangunan dan teknologi. Untuk sekolah misalnya, hingga tahun 2000-an Blang Pandak hanya memiliki sebuah Sekolah Dasar. Setelah jalan utama masuk gampong dibangun jalan aspal pada 2016, Blang

⁴ <https://m.kumparan.com/acehkini/kisah-eks-kombatan-gam-saat-konflik-aceh-menghadapi-gempuran-tni-2-1rddSpsR41X> diakses pada 25 November 2020 pukul 05.47 WIB

⁵ Wawancara dengan Tgk Banta Lida, Sabtu 26 September 2020, di kediamannya Blang Pandak

Pandak pun berubah. “Setelah dibangun jalan aspal itu berturut-turut kami memperoleh sebuah SD lain, juga Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri,” ungkap Tgk Banta Lida.

Keterpencilan Blang Pandak, kata Tgk Banta Lida, sudah dirasakan mereka sejak masa kolonial Belanda. Kala itu, Belanda mendirikan penjara di lembah Blang Pandak. Penjara dibangun sekitar akhir abad ke-19 dan berfungsi hingga awal abad ke-20. Selain para pelaku kriminal biasa, penjara itu juga digunakan sebagai tempat menghukum penentang Pemerintah Kolonial Belanda. Para terpidana ini sekaligus dijadikan buruh kerja paksa pada perkebunan kopi Pemerintah Kolonial.

Lembah Blang Pandak semula merupakan bagian dari Gampong Rantau Panyang, dikenal dengan sebutan Lhok Glap⁶ karena adanya penjara itu. Menurut tradisi lisan turun temurun, setelah Belanda hengkang dari Aceh, para penghuni penjara tidak meninggalkan Lhok Glap. Mereka terus bermukim di situ, dan menjadi warga pertama Gampong Blang Pandak. Pergantian nama dari Lhok Glap menjadi Blang Pandak terjadi sekitar tahun tujuh puluhan.⁷ Meski demikian istilah “glap” masih tetap digunakan warga. Terutama untuk menyebut Pos tentara yang didirikan di situs bekas penjara kolonial tersebut.⁸

Tgk Banta Lida, kelahiran 1972, juga menuturkan kilasan sejarah konflik yang terjadi di Blang Pandak, sesuai ingatannya. Menurut Tgk Banta Lida, di masa awal konflik Aceh (1980-an) Gampong Blang Pandak berpenduduk sekitar 300 KK, dan umumnya adalah petani. “Dari jumlah sekian itu, 80 persen merupakan anggota atau simpatisan GAM,” ungkapnya.

Situasi Blang Pandak yang terpencil, didukung kesuburan tanahnya yang dibelah Krueng Jalo, Krueng Balee dan Krueng Tangse, seolah menjadikan gampong ini tempat ideal bagi GAM untuk mendapatkan pasokan logistik. Selain itu, Bukit Cokan di Kecamatan Tiro yang merupakan lokasi bersejarah tempat deklarasi Aceh Merdeka (AM) 4 Desember 1976, berada di wilayah gunung Halimon yang berada di kawasan Blang Pandak.⁹

⁶ Glap = Penjara (Bahasa Aceh)

⁷ Wawancara dengan Tgk Banta Lida, Sabtu 26 September 2020, di kediamannya, Blang Pandak, Pidie

⁸ Wawancara dengan Zulkifli, Sabtu 26 September 2020 di kediaman Ibu AS di Blang Pandak, Pidie

⁹ Wawancara dengan Tgk Banta Lida, Sabtu 26 September 2020, di kediamannya, Gampong Blang Pandak, Pidie.

Semasa konflik, aparat mendirikan pos pengawasan di situs bekas penjara buatan Belanda. Tempat itu berada di jalan masuk satu-satunya ke Blang Pandak. Siapa saja atau apa pun yang ke luar masuk Blang Pandak dapat dipantau dengan mudah melalui pos ini.

Menurut Tgk Banta Lida, pasukan aparat yang setiap hari berpatroli biasanya memasuki Blang Pandak dari arah gunung Halimon atau Krueng Jalo. “Hal ini kemungkinan karena mereka baru menyisir hutan mencari pasukan GAM,” tuturnya.

Berbatasan dengan Kecamatan Mane, Geumpang, Tiro dan Meureudue, lembah Blang Pandak merupakan jalur lintasan pasukan GAM. Pada 1999, saat terjadi kontak senjata antara GAM dengan PPRM (Pasukan Penindak Rusuh Masa) di wilayah Cot Goh, penduduk Blang Pandak terpaksa mengungsi. Lokasi pengungsian sampai ke Masjid Teupin Raya, Masjid Tgk Daud Beureueh (Masjid Baitul A’la Lilmujahiddin) Kecamatan Mutiara dan Masjid Rambayan di Kecamatan Peukan Baroe.

“Tangse kosong waktu itu, semua penduduk mengungsi,” tutur Zulkifli. “Kami semua mengalami gagal panen, karena padi yang sedang masak saat itu terpaksa ditinggal mengungsi,” tambah Tgk Banta Lida.¹⁰

Pernyataan Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR) Aceh yang dimuat buletin KontraS, 15 Juli 1999, menyebutkan adanya pengungsian besar-besaran di Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, Aceh Utara, Aceh Timur dan Aceh Barat saat itu bukan lagi merupakan kekuatiran atas terjadinya kontak senjata antara PPRM dan militer dengan kelompok GAM, melainkan telah menjadi cara warga Aceh menolak kehadiran PPRM/militer di daerahnya.¹¹

Pada tahun 2000-2003 warga Blang Pandak diwajibkan mengikuti latihan-latihan UKPP (Unit Kesatria Penegak Pancasila) atau RATIH (Rakyat Terlatih) binaan ABRI. Latihan diselenggarakan di lapangan Gampong Blang Dhod, Tangse. Setiap hari warga harus menempuh perjalanan sepuluh kilometer dari Blang Pandak menuju Blang Dhod.¹²

Berjalan kaki ke Keudee Tangse juga dialami oleh para perempuan Blang Pandak yang suaminya anggota GAM. Karena suami mereka meninggalkan desa untuk bergabung dengan GAM, maka para istri ini dipaksa wajib lapor. Setiap hari mereka

¹⁰ Wawancara dengan Pak Zulkifli di kediaman Tgk Banta Lida, Sabtu 26 September 2020

¹¹ <http://kontras.org/backup/home/index.php?module=berita&id=309> diunduh pada 11/11/2020 pukul 13.36 WIB

¹² Op.cit

harus melapor ke Pos Pulo Kawa, Pos Cot Cekok dan/atau Koramil Tangse.¹³ Jaraknya 12 km dari Blang Pandak. Beberapa di antara mereka dalam keadaan hamil, atau terpaksa harus membawa bayi dan anak-anak mereka yang masih balita.¹⁴

Dari rumah Keuchik Tgk Banta Lida, perjalanan dilanjutkan ke rumah Ibu AS, salah satu korban peristiwa KS. Ibu AS, masih tinggal di rumah yang sama, yang ditempatinya pada masa konflik. Saat Tim tiba di rumah Ibu AS, enam korban KS lain yang telah diambil pernyataannya oleh KKR Aceh sudah berada di sana. Mereka yang hadir adalah:

1. Ibu RH binti T
2. Ibu AI binti AB
3. Ibu NR binti MA
4. Ibu RA binti H
5. Ibu AS binti MH
6. Ibu SP binti AB

Ibu AS menjadi pembicara utama, menuturkan ulang pengalamannya kala menjalani wajib lapor ke Pos SGI. Kawan-kawannya menyahuti dan menambah informasi, sesuai pengalaman masing-masing.

2.b. Bilie Aron (Rumoh Geudong)

Pidie merupakan kabupaten dengan catatan peristiwa kekerasan terbanyak sepanjang sejarah konflik Aceh. Pidie juga yang memahatkan nama pos yang paling ditakuti pada masa kelam itu, Pos Sattis Bilie Aron, yang lebih dikenal dengan nama *Rumoh Geudong*.¹⁵

Rumah tua yang semula merupakan kediaman *ulee balang* setempat diubah menjadi Pos Satuan Taktis/SGI Kopassus pada 1990. Menempati lahan sekitar 150 meter x 180 meter. Samsidar, seorang aktivis perempuan senior asal Aceh Tengah menuturkan bahwa ia masih ingat darah yang menempel di batang pohon kelapa di halaman Rumoh Geudong. Ia juga takkan lupa pengeras suara yang dipasang pada pepohonan. Pelantang suara tersebut, katanya, digunakan untuk meredam teriakan korban saat disiksa di

¹³ Pos Pulo Kawa merupakan bangunan bekas Kantor Pekerjaan Umum Tangse yang dialih fungsikan menjadi markas SGI/Kopassus. Pos Cot Cekok adalah bangunan bekas Puskesmas di Keudee Tangse

¹⁴ Informasi pangkalan data KKR Aceh, dan wawancara dalam pertemuan di rumah Ibu AS di Blang Pandak, Sabtu 26 September 2020

¹⁵ Ihwal peristiwa KS di Rumoh Gedong telah diselidiki Komnas HAM RI, antara lain, lihat <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/10/12085951/pelanggaran-ham-rumoh-geudong-tak-ada-alasan-kejaksaan-agung-untuk-diam> diakses pada 22 November 2020.

Rumoh Gedong. Ada juga beberapa kolam di pekarangannya, yang digunakan untuk menyiksa korban.¹⁶

Rumoh Geudong dibakar warga setelah rombongan tim Komnas HAM RI dipimpin Baharuddin Lopa meninggalkan tempat tersebut pada 21 Agustus 1998.¹⁷

Jumlah sebenarnya korban situs kamp penyiksaan yang disebut Reza Idria dan Azhari Aiyub sebagai “gulag”¹⁸ itu tidak dapat ditentukan dengan pasti.¹⁹ Namun tim Komnas HAM di bawah Baharuddin Lopa menemukan sedikitnya 74 perempuan mengalami perkosaan, 109 penduduk sipil disiksa, dan delapan orang hilang, terkait dengan keberadaan “Rumoh Geudong” tersebut.

Tim mendatangi rumah RS, yang pada saat ditahan di Rumoh Geudong berstatus gadis usia 19 tahun. Ketika disambangi Tim di kediamannya pada 26 September 2020, ia tinggal bersama suami serta tiga anaknya.

RS ditangkap pada 2001 bersama ibu dan kakaknya. Ia dibawa ke Rumoh Geudong dan ditahan di sana selama lima bulan. Selama lima bulan itu pula ia setiap hari disiksa. Demikian pula kakaknya, RSI, yang dibebaskan lebih dulu. Ada pun ibunda mereka, ibu NYK, suatu hari dibawa entah ke mana oleh aparat yang bemarkas di Rumoh Geudong, dan hingga kini tak diketahui rimbanya.²⁰

Menurut majalah *Tempo*, RS tidak secara resmi dibebaskan dari Rumoh Geudong. Tulisan *Tempo* mengenai hal itu begini: “... suatu hari di tahun 1998 RS disuruh memandu aparat untuk mencari GAM. RS berjalan ke arah kediamannya di Cot Murong. Ternyata, di depan rumahnya tengah ada demonstrasi mahasiswa. Mengetahui bahwa RS adalah tahanan di Rumoh Geudong, mahasiswa langsung menyelamatkannya.”²¹

¹⁶ Nashrun Marzuki dan Adi Warsini (ed), *Fakta Bicara*, Koalisi NGO HAM Aceh, Banda Aceh: 2011, hal 135

¹⁷ Ibid, hal 136

¹⁸ Kamp konsentrasi Uni Sovyet di Siberia yang dikenal dunia melalui karya pemenang Nobel Sastra, Alexander Solzhenitsyn, *Kepulauan Gulag*

¹⁹ Lihat <https://tirto.id/rumoh-geudong-ingatan-korban-dan-umur-panjang-kekejian-cmwr> diakses pada 21 November 2020.

²⁰ Wawancara dengan RS di kediamannya, Pidie, 27 September 2020.

²¹ <https://majalah.tempo.co/read/nasional/77137/perempuan-aceh-di-jepang-ke-jepang-demi-aceh> diakses pada 22/11/2020 pukul 10.32 WIB

Ketika dikonfirmasi *Tempo* soal RS, pada Januari 2001, Kepala Penerangan Korem 011/Lilawangsa, Kapten (Inf.) Abrori Abbas mengatakan, “Kasus ini sudah basi untuk diangkat kembali. Jika RS itu memang ada, silakan ajukan bukti ke pengadilan. Pemerintah sudah memutuskan untuk menegakkan supremasi hukum.”²²

3. Aceh Utara

3.a. Kecamatan Nisam Antara

Korban di Aceh Utara berasal dari Kecamatan Nisam Antara (sebelum dimekarkan, desa mereka termasuk dalam wilayah Kecamatan Nisam dan Dewantara) dan Paya Bakong. Daerah-daerah ini dipetakan aparat dan Pemerintah sebagai daerah hitam, daerah basis perlawanan GAM.

Dalam catatan, ada sembilan korban di Nisam Antara. Narahubung dengan korban adalah Ibu Badriyah dari Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RPuK).

3.b. Kecamatan Paya Bakong

Di Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bener Meriah ini tercatat ada 9 korban. Kasus perkosaan di Bukit Hagu dengan sudah diajukan ke Pengadilan dan pelakunya juga telah diadili. Para korban tinggal di Desa Alue Lhok. Selama proses persidangan korban didampingi oleh Jaringan Relawan Indonesia (JaRI).

Dalam hal kondisi wilayah, warga Kecamatan Paya Bakong dan Matangkuli sempat menyaksikan kejayaan ladang dan industri gas alam di tahun-tahun akhir 1970-an hingga 2015, ketika akhirnya PT Arun memutuskan menutup bisnisnya di sana.

Ketika Arun tengah berjaya, Lhokseumawe didorong menyediakan sarana-prasarana yang patut sebagai jawaban kehadiran para expatriat dan tenaga ahli dari luar Aceh yang bekerja di sana. Aceh Utara tumbuh menjadi ikon kemakmuran di tanah Aceh. Namun, posisi Lhokseumawe dan Aceh Utara sebagai “penghasil devisa” tidak berdampak positif pada kehidupan warganya.

DR Sebastian Koto menyebutkan bahwa kesenjangan pembagian hasil sumber daya alam juga terlihat pada data tahun 1977, yaitu devisa yang dihasilkan dari sumber daya gas alam Aceh Utara mencapai Rp. 316 triliun/tahun sementara PAD Aceh Utara

²² Ibid

1977/19 hanya Rp.13,4 miliar/tahun, dengan APBD tahun yang sama sebesar Rp.102 miliar (Bappeda, 1977).²³

Ketidakseimbangan ekonomi antara pendatang (termasuk ekspatriat) yang bekerja untuk PT Arun dan Mobil Oil Indonesia dengan *aneuk nanggroë* (penduduk asli) ini menyebabkan ketidakpuasan yang semakin lama semakin menumpuk. Bak api dalam sekam yang akhirnya meledak. Antara lain, berupa serangan bersenjata ke Mobil Oil, yang menewaskan seorang insinyur berkebangsaan Amerika Serikat. Aktor peristiwa tersebut kemudian diketahui berasal dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM).²⁴

Di Kecamatan ini, KKR menetapkan ada 9 peristiwa

IV. Telusuri Fakta, Selidiki Peristiwa

a. Kesaksian Korban

Dari kesaksian para korban diperoleh sepuluh jenis peristiwa KS khas masa konflik Aceh yang ditemukan Tim untuk keperluan laporan ini. Berikut dipaparkan secara ringkas:

1. Dipaksa Telanjang: alasan cari tato tanda anggota Inong Balee

Ketiga korban di Aceh Besar mengaku bahwa kala dipaksa melepaskan pakaian, pelaku beralasan hendak mencari tato. Menurut ANDR dan ERL, tato dimaksud adalah tato bulan bintang penanda anggota Inong Balee (pasukan perempuan GAM).

“Pelaku bilang mereka mencari tato ini di daerah seputar dada dan payudara, pangkal paha, pinggul atau di dekat kemaluan,” kata ANDR saat ditemui di rumahnya di Aceh Besar. Sambil menerangkan, ia menunjuk pangkal pahanya. “Pelaku menjungkit daster yang saya kenakan dengan laras senapannya. Katanya, tato Inong Balee itu ada di daerah sini,” katanya.

ERL yang tidak ragu mengakui dirinya sebagai anggota kombatan Inong Balee dengan jabatan cukup penting justru mengatakan bahwa ia tidak memiliki tato seperti yang dikatakan aparat.

“Saya ini shalat. Saya tidak mungkin pakai tato,” ungkapnya ketika diwawancara Tim di rumahnya. “Nanti ibadah kita tidak diterima Allah kalau kita bertato,” tegas ERL.

²³ Koto, Sebastian, DR., *Pengambilan keputusan dalam konflik Aceh*, Penerbit PAPYRUS, Surabaya: 2004. Hal 9

²⁴ <https://tirto.id/gam-lahir-demi-kedaulatan-atas-kekayaan-alam-aceh-cAMC> diakses pada 20 November 2020

ANDR mengatakan bahwa sebelum menyuruhnya melepaskan baju pelaku terlebih dulu menyuruh ANDR masuk ke ruangan yang terpisah dari kawan pelaku lainnya. Pelaku hanya sendirian melakukan tindakan itu. Meski WNTA juga dipaksa melepas pakaian dengan modus serupa (cari tato), tapi pelaku berjumlah empat orang yang menindaknya.

Ketiga korban mengaku mendapat penyiksaan. Namun, secara terpisah, mereka sama-sama mengaku tidak disentuh secara langsung oleh pelaku, melainkan dipukul dengan ujung senjata atau benda lain (tongkat kayu, dan sepatu bot). Pelaku tidak merenggut atau merobek baju korban. Di tempat terpisah, pada saat kejadian, ketiga korban (ERL, WNTA dan ANDR) dipaksa melepaskan sendiri pakaiannya.

Korban dari Nisam Antara, MART, MARN dan ASM melaporkan bahwa saat ditelanjangi atau pun dipaksa melepaskan pakaian sendiri, pelaku juga beralasan hendak "*mencari tanda Inong Balee*" di tubuhnya.²⁵

2. Dipaksa telanjang, disekap di ruangan kecil bersama lawan jenis dan dipaksa melakukan hubungan seksual

Sebelum ditahan di Pos SGI Pulo Kawa, Ibu AI binti AB dari Blang Pandak dipaksa melepaskan pakaiannya. Kemudian ia dimasukkan dalam sel yang sama dengan tahanan laki-laki, dan dipaksa untuk melakukan hubungan seksual. Korban mengatakan bahwa ia hanya memeluk dan mencium salah satu tahanan laki-laki yang kebetulan masih saudara sepupunya. Pada saat itu korban tengah hamil tujuh bulan.

Ibu AS juga mengalami hal serupa. Dia ditelanjangi secara paksa, kemudian dikurung dalam ruang sempit bersama tiga orang lelaki yang ada di sana. Ini terjadi di Pos Cot Cekok, Pidie.

Menurut para ibu ini, dalih mencari tato tidak digunakan pada mereka saat diperintahkan melucuti pakaian secara paksa.

3. Ditelanjangi, didorong bolak-balik antara dua pelaku

Korban NDR dari Nisam Antara menuturkan bahwa ia dibawa pelaku ke Pos di Cot Mancang yang merupakan rumah penduduk (Teungku Idris). Di sana ia dipaksa membuka pakaiannya, lalu oleh dua orang tentara ia didorong-dorong (seperti

²⁵ Informasi submisi RPuK

mengoper bola) dari satu pelaku ke pelaku lainnya. Setelah itu salah satu pelaku memeluknya seraya meremas payudaranya sementara kawannya disuruh berjaga. Kemudian NDR diperkosa tentara itu.

4. Ditelanjangi dan direndam dalam kolam

Seorang korban lain, Ibu TH binti AS ditelanjangi di Pos Cot Cekok, Pidie dan direndam dalam kolam semalaman. Saat itu TH membawa putrinya yang berusia satu tahun. Dalih mencari tato juga tidak digunakan pelaku pada saat ibu TH dipaksa menanggalkan pakaiannya.

5. Dipaksa mengulum dan menggigit alat kelamin pria yang sudah dipotong dan dikeringkan

Menurut penuturan para korban di Blang Pandak, Pidie mereka yang terkena wajib lapor ke Pos SGI Pulo Kawa dan Koramil Tangse, Pidie diperintahkan untuk menggigit alat kelamin laki-laki yang telah dipotong dan dikeringkan. Mereka sudah lupa tanggal dan bulan peristiwa, tetapi peristiwa itu hanya terjadi satu kali.

Selain teror psikologis, perbuatan ini juga merugikan kesehatan salah seorang korban secara langsung. Karena ketika tiba giliran Ibu HLM, organ manusia yang sudah dikeringkan itu pecah mengeluarkan cairan, yang tertelan oleh korban. Akibatnya dada Ibu HLM terasa sakit.

6. Kekerasan seksual dan pelecehan seksual bentuk lain, serangan pada seksualitas korban

Korban RKH dari Nisam Antara melaporkan bahwa ia diikat di kursi. Lalu lima orang pelaku meraba-raba paha dan payudaranya.²⁶

Korban Rumoh Geudong, RS, mengatakan bahwa setelah ditelanjangi ia dipaksa mengangkang di depan para pelaku. RS juga mengalami siksaan: dalam kondisi telanjang ia digantung dengan posisi kepala di bawah, kemudian puting kedua payudaranya digunting.²⁷

²⁶ Informasi submisi RPuK

²⁷ <https://majalah.tempo.co/read/nasional/77137/perempuan-aceh-di-jepang-ke-jepang-demi-aceh>
diakses pada 23/11/2020 pukul 00.40

Saat berada di tahanan dekat Laweung, Pidie, WNTA dari Aceh Besar sempat mengalami tindak pelecehan berupa diintip saat mandi, dan pahanya diraba-raba aparat tentara berpostur pendek berkulit hitam. Menurut WNTA saat itu Komandan Pos membela WNTA dan segera menghukum anak buahnya.²⁸

ASM dari Nisam Antara juga melaporkan bahwa beberapa hari setelah peristiwa perkosaan, tentara yang memperkosa, mengintipnya ketika sedang mandi di sumur yang ada di luar rumahnya. Saat itu juga ASM melaporkan pada suaminya, yang tengah berada di rumah.²⁹

Setelah suaminya tewas ditembak aparat, RSD binti TM dari Alue Papeun, Nisam Antara, Aceh Utara dituduh menyediakan logistik untuk GAM. Dia diperiksa di Pos TNI dan diharuskan melapor ke sana selama delapan bulan. Saat melapor itu RSD binti TM selalu dilecehkan. Antara lain dengan dipaksa memijat dan mengelus-elus tubuh tentara yang baru pulang operasi.³⁰

AI binti ABD dicolek payudaranya dengan kayu, ketika ia pulang melapor dari Pos Cot Cekok, Blang Pandak, Pidie. Saat itu AI tengah menyusui, dan hari itu belum sempat memberi ASI pada bayinya yang baru berusia dua bulan, sehingga payudaranya bengkak.³¹

7. Perkosaan bermodus pemeriksaan KTP

Empat korban di Alue Lhok, Aceh Utara mengalami perkosaan dalam waktu berturut-turut, secara bergiliran, selama tiga hari dengan modus sama yaitu pemeriksaan KTP.

Pada 20 Juni 2003 korban pertama, SDH, diperkosa di kebun sekitar 400 mter dari rumahnya. Keesokan harinya, 21 Juni, dua korban lagi, NRL dan NA. Dihari yang sama, dengan TKP yang sama pula, satu korban, NI, gagal diperkosa karena mengaku tengah menstruasi. Akibatnya NRL mengalami perkosaan berulang karena satu dari tiga pelaku belum sempat memuaskan hajatnya. Pada 22 Juni 2003 ada korban lagi: HNS.³²

²⁸ Wawancara di Aceh Besar, 25 Agustus 2020

²⁹ Informasi submisi RPUK

³⁰ Ibid

³¹ Informasi pangkalan data KKR Aceh

³² Informasi submisi JaRI

Pada peristiwa itu, pelaku diidentifikasi sebagai tentara dari Pos Cot Girek, Aceh Utara.³³ Para pelaku (tiga orang) telah diadili di Mahkamah Militer Lhokseumawe dan dijatuhi hukuman beragam, paling tinggi empat tahun penjara dan dipecat dari dinas kemiliteran.³⁴

Selain korban dari peristiwa perkosaan yang berturut-turut tersebut, tercatat dua korban lagi, LTF dan NRH. Keduanya diperkosa di rumah mereka sendiri, di depan suami-suami mereka.³⁵

Korban dari Nisam Antara, MART, MAR dan ASN melaporkan bahwa mereka digiring masuk kamar di bawah todongan senjata, dipaksa melepaskan pakaian lalu diperkosa.³⁶

Korban RKH, juga dari Nisam Antara, diperkosa oleh lima pelaku di Pos Cot Mancang, sampai tak sadarkan diri.³⁷

Korban MP dari Alue Papeun, Nisam Antara, diperkosa sambil berdiri. Pelaku melakukan perkosaan dari belakang tubuh MP. MP menceritakan bahwa tindakan pelaku selama memperkosa sangat brutal, menyebabkan MP tak sadarkan diri. Ketika siuman, MP mendapati darah meleleh memenuhi pahanya. Ia juga tak berhenti terkencing-kencing.³⁸

Korban lain yang mengalami perkosaan di tempat, waktu dan oleh pelaku yang sama adalah ATH, juga warga Alue Papeun. Pada saat kejadian ia tinggal di Dusun Blang Rimeh, Alue Papeun, Aceh Utara.³⁹

8. Dilecehkan secara verbal

ANDR dari Aceh Besar mendapat perundungan verbal bersifat seksual dari aparat. Tahun 2001 ketika ANDR mengalami KS, suaminya, Abu Nek, Panglima GAM Wilayah Aceh Besar, masih hidup. Saat tentara gabungan datang ke rumahnya bulan November 2001, ANDR sedang hamil lima bulan. Melihat ini tentara (tidak disebutkan secara rinci, siapa atau dari kesatuan mana) berkomentar, "Ibu bilang Bapak (Abu Nek) tidak pulang, jadi kenapa juga bisa hamil? Suami tidak pulang orang kok bunting."⁴⁰

³³ Nashrun Marzuki dan Adi Warsidi (ed), Fakta Bicara, Koalisi NGO HAM, Banda Aceh: 2011. Hal 139

³⁴ Ibid, hal 146

³⁵ Informasi submisi JaRI

³⁶ Informasi submisi RPuK

³⁷ Ibid

³⁸ Ibid, dikonfirmasi pada saat wawancara dengan Ibu Badriyah RPuK

³⁹ Ibid, perlu ditelusuri lebih lanjut

⁴⁰ Informasi dari pangkalan data KKR Aceh

RSD binti TM, korban dari Alue Papeun, Nisam Antara, menuturkan bahwa selama ia ditinggalkan suaminya “masuk hutan” tentara selalu datang ke rumahnya. Mereka sering mengadakan “serangan fajar” alias mendatangi rumahnya pada jam-jam dini hari menjelang subuh. Pada saat seperti itu, RSD kerap mendapat pelecehan verbal dari tentara, yang memanggilnya dari luar rumah agar dibukakan pintu. Yang diingatnya antara lain kalimat ini: “Hai cantik, ayo *ngentot* sama aku yok.”⁴¹

9. Perut diurut paksa tentara, agar keguguran

Korban TIH binti AS yang terkena wajib lapor setiap hari ke Pos SGI Cot Cekok, Blang Pandak, menceritakan ritual interogasinya. Ia menuturkan bahwa setiap kali datang ke Pos ia didudukkan di sebuah kursi dengan kaki dan tangan terikat ke belakang. Bila diinterogasi ia selalu mendapat penyiksaan berupa pemukulan. Saat itu ia tengah hamil anak pertama, dan suatu hari (tidak disebutkan kapan dan pada usia kehamilan berapa bulan) tentara di Pos Cot Cekok mengurut perutnya agar ia keguguran. Namun karena belum waktunya melahirkan, kandungan TIH berhasil bertahan. Hanya saja, saat putranya lahir, ternyata tangannya bengkok, tak dapat diluruskan.⁴²

10. Perbudakan seksual

Seorang korban warga Alue Papeun, RSD binti TM, selama tiga bulan diharuskan melapor tiga kali sehari. Ini berlangsung selama tiga bulan. Kemudian frekuensinya berkurang menjadi tiga kali dalam sepekan. Setelah itu, satu kali sebulan. Wajib lapor ini berlangsung selama delapan bulan. Setiap kali RSD melapor, ia selalu dipaksa melakukan tindakan seksual seperti memijat dan mengelus-elus tubuh para tentara yang baru pulang operasi. Ia juga dipaksa untuk melakukan oral seks oleh para tentara tersebut.

Pada satu kesempatan ia dipaksa melepaskan pakaian, kemudian menurut bahasanya sendiri, “*Lön dipelaku le dua awaknyan lagee binatang.*” (Saya “dikerjai” dua orang sekaligus layaknya binatang).

⁴¹ Informasi dari dokumen submisi RPUK

⁴² Informasi pangkalan data KKR Aceh

RSD mengatakan bahwa paksaan terjadi setiap kali ia harus melapor ke Pos Alue Papeun dengan cara disekap di sebuah ruangan di samping ruang penyiksaan.

Di Kecamatan Nisam ini masih ada korban lain yang mengalami pemaksaan hubungan seksual secara berulang. Korban diperintahkan untuk melapor setiap hari ke Pos Cot Rambong, Alue Papeun, dan di sana mengalami tindak KS. Akibat tindakan tersebut korban hamil dan melahirkan seorang anak perempuan pada tahun 1999.⁴³

“Korban meninggal pada tahun 2005. Jenazahnya ditemukan di kebun pinggir hutan dalam kondisi mengenaskan, penuh bekas penyiksaan dan luka tembak,” tutur Ibu Badriyah di Lhokseumawe.

Lebih lanjut, Badriyah menceritakan bahwa pada tahun 2013 anak almarhumah korban tersebut kedapatan hamil di luar nikah. “Kemudian ia dinikahi oleh lelaki yang menghamilinya. Setelah itu mereka pindah ke Jakarta. Menurut informasi terakhir, di Jakarta ia dijual suaminya pada mucikari di wilayah Jakarta Utara,” jelasnya.

Kepala Pusat Kajian Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Syiah Kuala, Khairani Arifin, SH, M.Hum, mengatakan bahwa dalam suatu peristiwa perkosaan, korban yang jatuh bukan hanya si objek perkosaan. Orang-orang di sekitarnya pun turut menjadi korban. Fenomena “korban tak langsung” seperti ini adalah sesuatu yang selalu ada dalam suatu kejahatan, terutama kejahatan seksual.

Setelah peristiwa kejahatan itu terjadi, korban, dan orang-orang di sekitarnya, acapkali harus berhadapan dengan hal-hal yang membuat mereka kembali jatuh menjadi korban.

Dalam hal putri korban perbudakan seksual di atas, karena ia lahir dari hubungan yang tidak sah menurut tatanan agama dan moral masyarakat, maka secara sosial ia terlontar ke posisi yang tidak menguntungkan. Si anak mendapat stigma sebagai seseorang yang mudah dan pantas dilecehkan, bahkan diperkosa sekali pun atau dijual sebagai objek seksual.⁴⁴

⁴³ Wawancara dengan Ibu Badriyah RPuK

⁴⁴ Wawancara dengan Ibu Khairani Arifin di kediamannya di Banda Aceh, 18 November 2020

Sebagai seseorang yang tidak memiliki posisi tawar, korban perkosaan ada dalam posisi rentan mengalami kekerasan-kekerasan baru. Maka tidak mengherankan bila banyak korban perkosaan kemudian juga mengalami KDRT (kekerasan dalam rumah tangga). Kekerasan seksual yang telah menimpanya seolah menjadi pembenaran bagi terjadinya kekerasan-kekerasan lain, karena si korban telah mendapat cap sebagai perempuan “yang pantas diperlakukan demikian.”

b. Operasi Militer, Sebaran Wilayah Peristiwa dan Titik Pos Militer

- **Operasi Militer 1989-1999**

Selama sepuluh tahun, Pemerintah RI mengirimkan pasukan ke Aceh untuk menangani GAM. Dalam disertasinya yang berjudul Pengambilan keputusan dalam konflik Aceh, peneliti militer DR. Sebastian Koto menyatakan bahwa operasi itu adalah:

- 1) Operasi Lila Putih, Agustus 1988-Maret 1989, sasaran: pembersihan sisa-sisa GAM
- 2) Operasi Sadar Rencong, Maret 1989-Januari 1990, sasaran: difokuskan di Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie
- 3) Operasi Siwa, Februari 1990-Mei 1990, sasaran: menghadapi aksi GAM yang cenderung meningkat
- 4) Operasi Jaring Merah I s/d VII, Juli 1990-1996, sasaran: menghancurkan dan menghilangkan sisa-sisa GAM dan ide-ide separatisnya
- 5) Operasi Jaring Merah VIII dan IX, 1996-31 Maret 1999, sasaran: pembersihan sisa-sisa GAM

Lebih lanjut DR Sebastian Koto mengungkapkan bahwa keputusan tindakan militer yang diambil memiliki format rencana operasi yang berisi hal-hal antara lain:

- 1) Situasi umum daerah operasi
- 2) Kronologi kejadian faktual
- 3) Tugas pokok kesatuan yang tercantum dalam Rencana Operasi
- 4) Konsep dan tahapan operasi

5) Pelaksanaan operasi

Dalam implementasinya, meningkatnya kegiatan-kegiatan intelejen kemudian mampu mengungkapkan, menguraikan dan mengisolasi aktivitas GAM. Namun rumusan kegiatan dan cara bertindak dalam rencana operasi tidak secara jelas diarahkan pada satuan-satuan pelaksana.

Dengan Korem 011/Lilawangsa sebagai Komando Pelaksana Operasi Jaring Merah, Satgas Intelijen Kolaksops (Komando Pelaksana Operasi) berupaya mengungkap jaringan dan tokoh-tokoh puncak GAM, dukungan logistiknya, terutama pemanfaatan ganja dan perbuatan kriminalitas yang digunakan mendukung aktivitas GAM.

Di sisi lain, para perempuan penyintas dalam investigasi ini, yang telah diambil pernyataannya oleh KKR Aceh, mengatakan bahwa mereka dituduh sebagai penyedia logistik GAM serta mendukung aktivitas GAM dengan upaya menyediakan tempat bersembunyi, menghilangkan jejak atau menyediakan tempat berteduh. Pada beberapa kesempatan para perempuan ini dijadikan “penunjuk jalan” oleh aparat. Mereka diperintahkan membuat bu kulah (nasi bungkus) kemudian masuk hutan mencari tempat persembunyian pasukan GAM. Sementara itu, pasukan aparat mengikuti dari belakang.

Tudingan sebagai penyedia logistik GAM membuat persediaan pangan di rumah para korban disita oleh aparat. Dengan alasan bahwa bahan pangan itu pasti disediakan untuk GAM.

Pola seperti ini berulang baik di Kabupaten Aceh Besar, Aceh Utara mau pun Pidie, dengan konsentrasi temuan peristiwa terbanyak selama Operasi Jaring Merah 1990-1999.

Kekerasan menunjukkan tren meningkat setelah Panglima ABRI Jendral Wiranto mengumumkan pencabutan Daerah Operasi Militer pada 7 Agustus 1998.

DR Daniel Hutagalung, dosen Universitas Indonesia dan peneliti pada Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial UI, dalam papernya yang dipublikasikan di Researchgate.net, mengatakan bahwa beberapa pelanggaran HAM skala berat justru berlangsung sesudah dicabutnya DOM dan digantikan oleh beberapa operasi militer seperti Operasi Sadar Wibawa, Operasi Sadar Rencong I, II, III, Operasi Meunasah, dan

Operasi Pemulihan Keamanan. Bahkan dari berbagai laporan investigasi, tercatat angka-angka yang cukup fantastis:

Pelanggaran HAM Januari 1999 sampai September 2002

Jenis kasus	Jumlah Korban
Pembunuhan Kilat / Sewenang-wenang di luar Proses Hukum	2,508 orang
Penghilangan Paksa	533 orang
Penyiksaan	2,946 orang
Penangkapan Sewenang-wenang	1,600 orang

Sumber: (Hutagalung 2004: 9)

Sayangnya peristiwa KS tidak terdokumentasikan dengan baik. Hal ini karena umumnya korban peristiwa KS dikungkung perasaan aib, takut dan malu, sehingga enggan untuk melaporkan kejadian yang menimpanya.

Kegagalan CoHA mencapai kulminasi dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) No.28/2003 mengenai “Status Darurat Militer untuk Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)” yang berlaku efektif mulai tanggal 19 Mei 2003 pukul 00.00 sampai jangka waktu enam (6) bulan.

Sebaran wilyah peristiwa

Tindak kekerasan seksual pada korban yang diwawancarai tahun 2020 ini terjadi pada rentang waktu tahun 1999-2005.

Dalam buku DR Sebastian Koto, menurut laporan Evaluasi Pelaksanaan Operasi Jaring oleh Kodam I Bukit Barisan, disebutkan bahwa disposisi atau daerah operasi GAM menyebar di tiga wilayah Kabupaten sepanjang pantai Utara Aceh. Terutama terkonsentrasi di Kecamatan Tiro, Panton Labu, Matangkuli, Kedai Gerobak, Idi Rayeuk, Nisam, Kandang dan Julok.⁴⁵

Sedangkan tempat terjadinya peristiwa kekerasan seksual dapat dibagi menjadi:

- 1) Pos aparat, baik itu Koramil mau pun Pos-pos Sattis dan SGI (Satuan Gabungan Intelejen)

⁴⁵ Koto, DR Sebastian, Pengambilan keputusan dalam konflik Aceh, Penerbit PAPYRUS, Surabaya: 200. Hal 28

- 2) Daerah terpencil dan memiliki tutupan vegetasi cukup lebat (hutan produksi, kebun), yang jaraknya tidak mutlak jauh dari rumah korban
- 3) Rumah korban sendiri

Titik-titik Pos Aparat

Semasa konflik, pos-pos aparat muncul di mana-mana di ketiga Kabupaten yang dianggap sebagai daerah hitam oleh Pemerintah. Mulai dari tingkat Kecamatan hingga di dusun. Pos-pos ini ada yang sengaja dibangun untuk kepentingan operasi, seperti yang dituturkan Ulfa Khairina, ada juga yang langsung menggunakan bangunan yang sudah ada.

Pos yang menggunakan bangunan yang sudah ada misalnya Pos Sattis Bilie Aron Rumoh Geudong, Pos Sattis Pulo Kawa, Pos SGI Cot Rambong, Pos Sattis Pintu Satu Tiro, Pos Cot Mancang dan sebagainya. Mereka menggunakan rumah-rumah penduduk yang lokasinya strategis. Misalnya berada di jalan besar, jalan perlintasan penduduk, ada di ketinggian, dan seterusnya.⁴⁶

Pos-pos juga didirikan di sekitar dan di dalam kompleks PT Arun dan Mobil Oil. Menurut penduduk asli Arun, pada masa genting dulu ada dua pos besar di dalam kompleks. Yang sebuah terletak dekat gerbang keluar, sebuah lagi di dalam, di sebuah gudang.⁴⁷ Namun di mana persisnya letak gudang tersebut, sumber tidak dapat memberitahu.

Kepala Pusham Unsyiah Khairani Arifin, SH, M.Hum mengatakan bahwa pembangunan Pos-pos dengan posisi demikian itu bertujuan mengamankan aset-aset negara. Dalam hal PT Arun dan Mobil Oil Indonesia, Pos aparat juga ada di dalam kompleks perusahaan, dan menggunakan gedung milik perusahaan.⁴⁸

“Kebetulan, ayah saya penduduk asli Aron. Jadi, keluarga saya menyaksikan, bahwa dimasa itu, pos-pos aparat banyak sekali di sekitar kampung kami,” terang Khairani. Keberadaan pos yang cukup besar di dalam kompleks Arun dikonfirmasi.

⁴⁶ Wawancara dengan Mulyadi dan Fazir, Lhokseumawe 18-19 Oktober 2020

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Khairani Arifin di kediamannya, Banda Aceh 18 November 2020

“Kami semua tahu bahwa ada pos di dalam sana (kompleks Arun). Ada dua,” tambahnya. Konfirmasi ini sesuai dengan keterangan Mulyadi dan Fazir. Keduanya mengatakan bahwa masyarakat dusun mereka biasa melihat tentara keluar masuk kompleks perusahaan multinasional itu.

Kompleks PT Arun/Mobil Oil memiliki berbagai fasilitas penunjang termasuk rumah sakit, stadion olah raga, sekolah-sekolah mulai tingkat Taman Kanak-kanak sampai SMA, bahkan sebuah bandara sendiri. Kini beberapa gedung yang dulu digunakan sebagai sarana penunjang kegiatan karyawan PT Arun/ Mobil Oil telah beralih fungsi. Ada gedung SD yang menjadi pabrik air mineral, bahkan ada yang sudah tidak digunakan lagi, seperti misalnya bangunan TK I di daerah Jalan Pangkalan Brandan atau TK III Jalan Dumai.⁴⁹

Seluruh jalanan di Kompleks “penanggung uang”, julukan yang diberikan media *Serambi Indonesia* pada PT Arun, dilapisi aspal *hot mix*.

Perusahaan Amerika Serikat Mobil Oil mengelola empat blok sumur gas di Cluster IV. Lokasinya sekitar 30 km dari Kota Lhokseumawe. Cluster IV adalah satu-satunya cluster sumur (setiap cluster memiliki 16 sumur) yang masih memproduksi. Sementara tiga cluster lainnya hanya menyedot sisa-sisa. Sumur-sumur Mobil Oil membentang sepanjang sekitar 18 km, meliputi Kecamatan Syamtalira Aron, Nibong, Tanah Luas dan Matangkuli.⁵⁰ Ladang gas terbesar di dunia ditemukan di Simpang Mulieng, Syamtalira Aron, pada tahun 1971.

Di tahun 2017, Presiden AS Donald Trump mengumumkan akan mengangkat Rex Tillerson, CEO Mobil Oil, menjadi Menteri Luar Negeri. Pengangkatan Tillerson menarik perhatian banyak pihak karena diduga terlibat pelanggaran HAM di Aceh.⁵¹

Majalah Tempo melaporkan bahwa sejak beroperasi, Mobil Oil telah “menyewa” militer untuk menjaga fasilitas di Aceh. Seiring pertempuran antara kelompok pemberontak Aceh dengan militer Indonesia pada 1990-an hingga awal 200-an, sejumlah tentara

⁴⁹ Wawancara dengan Mulyadi dan Fazir

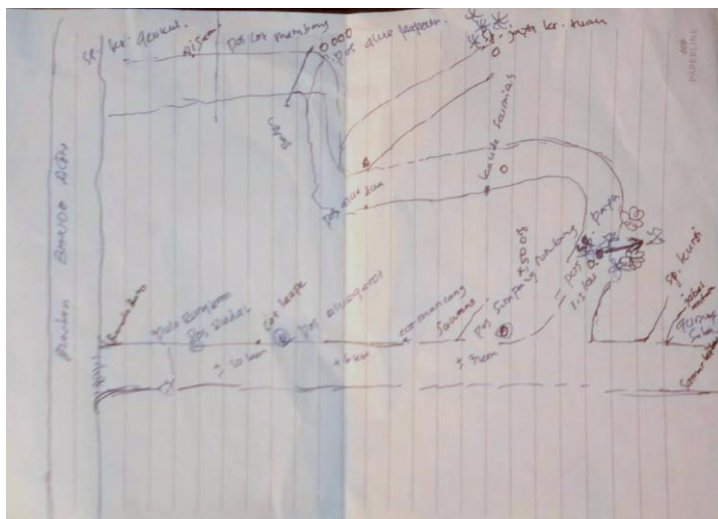
⁵⁰ <https://id.portalsatu.com/2014/08/masa-depan-arun> diakses pada 20/11/2020 pukul 00.50 WIB

⁵¹ <https://dunia.tempo.co/read/835165/calon-menlu-pilihan-trump-terlibat-pelanggaran-ham-di-aceh> diakses pada 20 November 2020 pukul 11.33 WIB

yang bekerja untuk Mobil Oil dituduh melakukan penyiksaan, menangkap, memperkosa hingga membunuh warga sekitar.⁵²

Meski tak ada perusahaan minyak dan gas multinasional di Nisam, namun suasana di Kecamatan itu pun tak banyak beda.

Ibu Badriyah menggambarkan bahwa pos aparat di Nisam didirikan di hampir semua ruas jalan. Terutama jalan menuju Gampong Seumirah, Alue Papeun, ke arah simpang Krueng Geukeuh.



Gb. Sketsa titik-titik Pos Aparat di Kecamatan Nisam Antara, 1989-2005

(sketsa oleh Ibu Badriyah)

Jalan Kertas Kraft Aceh (KKA), jalan sepanjang sekitar 100 km yang menghubungkan pabrik kertas PT KKA dengan kebun pinus di Ilaq, Kabupaten Bener Meriah, membelah Kecamatan Nisam Antara. Di sepanjang jalan ini terdapat Pos-pos aparat dengan jarak antara 1.5 km sampai dengan 10 km.

Pada saat ini, pos-pos tersebut sebagian besar sudah tak ada. Namun pos terakhir sebelum Gunung Salak, yaitu pos di Jembatan Krueng Tuan, masih berdiri, menyisakan ruangan tertutup di belakang, serta ruang jaga di depan. Pos itu terletak di

⁵² Ibid

sebuah busut, lebih tinggi daripada jembatan. Dari posisi pos cukup mudah memantau apa yang terjadi di sepanjang jembatan.

Di Kecamatan Paya Bakong dan Matangkuli, titik-titik utama Pos aparat adalah di seputar situs Mobil Oil. Dua dosen dan peneliti dari STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Mellyan Cutkeumala Nyakman dan Ulfa Khairina, mengatakan bahwa saat mereka meneliti kasus kekerasan seksual yang menimpa warga Alue Lhok di Bukit Hagu pada tahun 2012, keberadaan pos-pos aparat masih dapat ditelusuri.

“Titik-titik pos yang dapat kami amati terdapat di sepanjang jalan raya menuju Lhokseumawe dari arah Matangkuli,” cerita Ulfa. “Posisinya zigzag, bergantian di kanan-kiri jalan. Di dekat gerbang kompleks Mobil Oil terdapat Pos yang lebih besar daripada di tempat lain.”

Kedua peneliti muda tersebut menuturkan bahwa bagian-bagian pos-pos tersebut masih menunjukkan cat warna hijau, serta gambar topi baret dan senapan. Bagian depan pos umumnya terbuka, namun di bagian belakang terdapat satu ruangan tertutup. Di beberapa bagian halaman Pos ada tumpukan karung berisi pasir. Ulfa Khairina menghitung ada sekitar dua belas hingga lima belas Pos, di ruas jalan sepanjang 30 km. Rata-rata satu pos setiap setengah kilometer.

Selain pos yang sengaja dibangun untuk keperluan pengawasan seperti yang dituturkan Ulfa Khairina, pasukan aparat juga menggunakan bangunan yang sudah ada untuk dijadikan pos. Pos yang demikian contohnya Pos Cot Mancang di tepi Jalan Kertas Kraft Aceh. Pos ini adalah rumah penduduk, Teungku Idris, yang diduduki tentara dijadikan Pos. Pos Cot Cekok di Tangse menggunakan fasilitas umum, yaitu bangunan Puskesmas yang berada di ketinggian bukit (cot). Pos SGI Pulo Kawa, juga di Tangse, menggunakan bekas kantor PU.

Situasi lingkungan tempat tinggal korban

Secara umum, rumah para korban yang sebagian besar berprofesi petani, terletak di wilayah pertanian, perkebunan rakyat dan hutan produksi. Baik untuk kluster Aceh Besar, Aceh Utara mau pun Pidie. Seperti masyarakat pertanian di mana pun, para korban mendirikan rumah di titik dimana mereka memiliki akses tak terbatas pada lahan tempat bertanam. Karena itu di sekitar rumah terdapat kebun pinang, kopi,

dan berbagai pohon buah-buahan. Kini, hampir dua puluh tahun setelah konflik bersenjata di Aceh berakhir, daerah-daerah itu masih dikelilingi kebun dengan tutupan vegetasi cukup lebat.

Saat ini, sebagian jalan utama di gampong-gampong korban baik di Aceh Besar, Aceh Utara mau pun Pidie, sudah diaspal atau minimal dikeraskan/dilapisi batu sungai. Tetapi umumnya lebarnya tidak berubah banyak.

Jalan menuju rumah WNT di Aceh Besar, misalnya. Lebarnya hanya muat badan mobil *station wagon* kecil. Tidak muat mobil besar.

“Waktu saya ditangkap, tiga truk REO tentara diparkir di sana,” tangan WNT menunjuk arah jalan utama menuju dusunnya. “Mereka jalan kaki kemari.”

Hal yang sama dikatakan juga oleh ANDR.

“Tahu-tahu saja mereka sudah di halaman rumah. Komandannya jalan di belakang,” kata ANDR.

Tiga korban di Alue Lhok diperkosa di kebun/hutan produksi dalam perjalanan dari rumah mereka untuk “memproses pembuatan KTP di rumah Keuchik” karena tidak memiliki identitas yang legal ketika itu, yaitu KTP Merah Putih. Lokasi peristiwa adalah di Bukit Hagu. Lokasi ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Bener Meriah.⁵³ Sedangkan korban lain diperkosa di kebun/hutan produksi yang hanya berjarak 400 meter dari rumahnya.

Menurut Mellyan Nyakman, ditahun 2012 Alue Lhok merupakan daerah terpencil. Jalannya tanah, rumah-rumah korban yang didatangi masih terbuat dari daun rumbia. Biji-biji kakao yang tengah dijemur dan ditumpuk menyebar bau masam ke udara. Sekarang pun situasi tersebut belum banyak berubah.

Kondisi jalanan masih minus, saat hujan mendera jalan berubah menjadi sungai. Konflik dengan satwa liar masih kerap terjadi. Diawal tahun 2020 masyarakat Bukit Hagu yang secara administratif masuk ke Kecamatan Lhoksukon, malahan sempat

⁵³ Wawancara dengan Mellyan Cutkeumala Nyakman, M.Ag

membuat surat permohonan pada Kementerian Desa di Jakarta untuk membantu perbaikan jalan di desa mereka itu.

Dari pengamatan lapangan Tim di Kecamatan Nisam Antara, titik letak rumah korban yang mengalami peristiwa perkosaan cenderung berjauhan dengan rumah tetangga. Biasanya, juga dikelilingi kebun dengan vegetasi cukup rapat. Titik kediaman korban juga relatif dekat dengan keberadaan pos yang didirikan di masing-masing dusun.

Pada saat kejadian perkosaan di Bukit Hagu, Paya Bakong masih merupakan bagian dari Kecamatan Matangkuli, belum dimekarkan menjadi Kecamatan tersendiri. Ini berimbas pada tindakan yang diambil tiga orang korban Bukit Hagu, yang pertama kali melaporkan tindak perkosaan yang mereka alami ke Koramil Matangkuli.

Kecamatan Paya Bakong, dimana Alue Lhok terletak, adalah pemukiman terakhir setelah Simpang Mulieng, pusat pemerintahan Kecamatan Syamtalira Aron. Selebihnya adalah hutan dan perbukitan yang berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah. Jumlah penduduk Kecamatan Paya Bakong tidak banyak. Catatan Dinas Pekerjaan Umum Aceh Utara tahun 2016-2020 menunjukkan jumlah penduduk hanya 13.614 jiwa, dengan luas wilayah 418.32 km. Dengan demikian, pada tahun 2016 rasio penduduk terhadap luas wilayah Paya Bakong hanya 32.84 orang per km. Hal ini disebabkan karena Kecamatan Paya Bakong memiliki hutan negara yang cukup luas.⁵⁴

c. Sikap masyarakat Blang Pandak dan pengaruhnya pada sikap dan pandangan hidup korban

Dalam suatu kesempatan, Ibu AS bertemu dengan almarhum Maimul Fidar, Direktur Koalisi NGO HAM Aceh Periode 2000-2005. Maimul menyemangati Ibu AS, sehingga perempuan ini semakin menyadari hak-haknya. Tahun 2001 Ibu AS bersaksi tentang pengalamannya di depan masyarakat internasional di Swiss. Kenyataan ini, ditambah sikap Ibu AS yang percaya diri menyemangati rekan-rekannya yang lain, sehingga berani tampil untuk bersaksi.

54

http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_15081444594_BAB_IV-Profil_Kota.pdf diunduh pada 23/11/2020 pukul 12.24

Kepercayaan diri para perempuan korban ini dikuatkan oleh dukungan keluarga, serta masyarakat Gampong Blang Pandak sendiri.

“Saat itu, masyarakat merasa, sudah aman untuk memperlihatkan dukungan dan simpati pada korban,” jelas Pak Zulkifli.

Ia berpendapat bahwa sulit untuk menilai suatu peristiwa dengan kepala dingin dan bersikap memihak pada korban, ditengah situasi tidak menguntungkan saat konflik bersenjata di Aceh.

“Saya sendiri, sebagai penyintas, memerlukan waktu untuk memulihkan rasa percaya diri serta kemampuan saya untuk berpikir jernih. Saya baru mampu bangkit setelah melihat situasi Aceh dari *angle* lain, yaitu saat saya berada di Jakarta sebagai utusan relawan.”⁵⁵

Sejak masa tegang dulu, masyarakat gampong Blang Pandak yang subur ini tidak terpancing untuk mengucilkan penduduk yang dilabeli sebagai GAM, atau istri-istri serta anggota keluarga mereka. Meski pun, menurut Tgk Banta Lida, usaha memprovokasi ke arah sana terus dihembuskan oleh aparat yang bertugas di pos-pos BKO seperti Pos Pulo Kawa dan Cot Cekok. Hal ini dikonfirmasi oleh Pak Zulkifli.⁵⁶

“Waktu itu kondisi kampung sedang dalam ‘situasi perang’, kami menganggap kekerasan dan penyiksaan, termasuk penyiksaan seksual, sebagai sesuatu yang umum terjadi,” kata Tgk Banta Lida. “Memang benar, kami didorong untuk mengucilkan anggota masyarakat yang keluarganya bergabung dengan GAM. Mereka yang memprovokasi itu menyebut keluarga GAM sebagai ‘bijeh PKI’, harus dijauhi. Atau mereka mengancam akan menangkap kami, membakar rumah kami, bahkan menembak kami, bila kami menolong keluarga GAM. Namun masyarakat kami tidak membedakan satu sama lain.”

“Yang sedih itu justru karena masyarakat desa lain dipaksa menjauhi masyarakat Blang Pandak, karena kami dimasukkan dalam kategori “*daerah hitam*,” tambah Tgk Banta Lida. “Di masa gawat dulu, kalau ada warga Blang Pandak kehujanan dan minta izin pada warga gampong lain untuk sekedar memotong daun pisang untuk dijadikan

⁵⁵ Wawancara dengan Pak Zulkifli, 26 September 2020 di kediaman Ibu AS di Blang Pandak

⁵⁶ Wawancara dengan Tgk Banta Lida, 26 September 2020 di kediamannya di Blang Pandak

payung, maka pasti tidak akan diizinkan. Biasanya kami lalu disuruh cepat-cepat pergi. Itu yang paling menyedihkan.”⁵⁷

Meneruskan tradisi sejak zaman kolonial, sebagian besar masyarakat Blang Pandak adalah pendatang. Perantau yang kemudian menetap di Blang Pandak datang dari daerah-daerah seputar Tangse seperti Bireuen, bahkan Aceh Utara dan Aceh Timur. Ketujuh perempuan korban yang hadir dalam pertemuan dengan Tim semuanya merupakan pendatang. Arus migrasi yang dinamis ini menyiptakan keterbukaan terhadap pendatang pada masyarakat Blang Pandak.

Tujuh perempuan korban yang hadir pada pertemuan 26 September 2020 mengaku bahwa merekalah yang menjadi kepala keluarga dan pencari nafkah utama, setelah suami mereka masuk rimba raya menjadi anggota GAM.

Sebelum suami mereka meninggalkan rumah untuk bergabung dengan GAM, sebagian besar dari para korban ini bekerja sebagai petani atau pekebun. Setelah suami/kepala keluarga mereka pergi, maka para perempuan ini harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain bekerja di sawah atau kebun, ada juga yang menjadi guru mengaji, seperti Ibu TH binti AS.

Hasil bertani mereka bagi dua, sebagian untuk dimakan sehari-hari, sebagian lagi mereka simpan untuk diberikan pada ayah anak-anak mereka, bila suatu kali turun dari hutan. Saat itu, fungsi mereka sebagai manajer keluarga terlihat sangat menonjol.

Keuchik Blang Pandak Tgk Banta Lida bahkan mengatakan bahwa, “Saya memandang para ibu yang menjadi korban kekerasan selama konflik tersebut sebagai pahlawan keluarga. Karena mereka membela suami masing-masinglah, mereka menjadi korban kekerasan.”⁵⁸

Cara pikir yang unik dalam menyikapi kekerasan seksual, juga teresonansi dalam sikap Ibu AS dan rekan-rekannya. Sejak awal, mereka cukup terbuka menceritakan apa yang mereka alami pada para relawan.

⁵⁷ Ibid

⁵⁸ Ibid

Sikap mereka ini tidak lumrah dimiliki oleh korban kekerasan seksual. Umumnya korban KS menarik diri, tidak mau membicarakan apa yang terjadi pada mereka. Namun Ibu AS dan kawan-kawan bersikap cukup terbuka. Seperti kata Tgk Banta Lida, orang Blang Pandak menerima kenyataan bahwa negeri mereka tengah dalam keadaan perang. Nilai-nilai pada masa perang berbeda dengan nilai masa damai. Kesadaran akan perbedaan ini menyebabkan Ibu AS dan kawan-kawannya bertahan.

Dalam kaitannya dengan peperangan, kekerasan seksual yang menimpa Ibu AS dan korban lainnya bukan kekerasan biasa. Kekerasan seksual yang menimpa mereka adalah sebuah strategi perang. Seksualitas para perempuan itu diserang untuk menghancurkan citra kesucian mereka sebagai ibu. Ancaman perkosaan ditaburkan untuk memancing para suami mereka yang sudah bergabung dengan GAM agar turun gunung.

Ibu AS dan kawan-kawan melawan dengan menempatkan kekerasan seksual yang menimpa mereka pada tempatnya, yaitu sebagai strategi kemenangan perang. Karena itu mereka memilih untuk bicara.

Seperti yang diungkapkan Ibu AS: “Kami berani menceritakan tentang apa yang menimpa kami, karena memang fakta, itulah yang terjadi. Kami yakin kami tak bersalah. Kalau kami bersalah, tentu kami tak berani bicara apa-apa,” ungkapnya.

d. Alat Teror

Selama rentang waktu 1989-1998 (masa penerapan DOM, Daerah Operasi Militer), dengan pertimbangan rentang waktu vs banyaknya laporan, maka catatan atas peristiwa kekerasan seksual oleh aparat relatif tak banyak. Namun kemudian angka ini menunjukkan tren meningkat. Para korban mengonfirmasi bahwa eskalasi tindak kekerasan dari aparat semakin naik setelah DOM dinyatakan dicabut.

Dalam bahasa salah satu korban dari Aceh Besar, ERL, “Disini konflik itu dimulai dari tahun 2001-2004. Yang paling parah konfliknya adalah tahun 2002-2003.”⁵⁹ Di tahun-tahun itu, Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat dan Aceh Selatan yang semula relatif tenang, juga mulai mencatatkan laporan kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

⁵⁹ Informasi pangkalan data KKR Aceh

Dalam informasi dari pangkalan data KKR Aceh, terdapat empat laporan kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual dari Aceh Selatan, dan dua dari Aceh Jaya. Laporan dari Aceh Jaya juga memuat tentang peristiwa pernikahan paksa, dimana seorang perempuan bersuami dipaksa menceraikan suaminya yang anggota GAM agar bisa dinikahi paksa oleh seorang tentara.⁶⁰

Untuk Aceh Selatan, Human Rights Watch (HRW) memiliki dokumentasi tentang peristiwa kekerasan seksual terhadap lima gadis. Mereka mengalami perkosaan, bahkan perbudakan seksual, selama ditahan di sebuah Pos di Aceh Selatan, pada Februari 2001.⁶¹

Dalam sekian banyak kesaksian dari para perempuan korban kekerasan seksual, ditemukan benang merah yang menunjukkan kemungkinan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut merupakan peristiwa sistemik yang modelnya sudah direncanakan. Sistemik berarti adanya suatu pola atau metode tertentu yang diorganisir secara menyeluruh dan menggunakan pola yang tetap.

Khairani Arifin menyatakan hal tersebut dalam wawancara dengan Tim di kediamannya di Banda Aceh.

“Kalau kita cermati satu persatu, maka akan nampak jelas persamaan dari setiap kasus. Misalnya, mula-mula pintu rumah korban diketuk. Lalu listrik dipadamkan. Kemudian rumah korban digeledah dan korban diperkosa,” katanya. “Atau korban ditangkap, dibawa ke Pos, di sana diinterogasi, ditelanjangi, kemudian diperkosa.”

“Kenyataan bahwa banyak elemen dari peristiwa-peristiwa kekerasan seksual itu memiliki persamaan satu dengan yang lain membuktikan bahwa itu adalah sesuatu yang sistemik, direncanakan,” ujarnya lagi. “Dan sesuatu yang sistemik itu tentunya adalah buah dari sebuah kebijakan di tingkat pengambil keputusan.”⁶²

Dalam ***Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat di Aceh: peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis lainnya***, Komnas HAM menulis bahwa strategi berikut dari pelaksanaan operasi militer adalah

⁶⁰ Ibid

⁶¹ Amnesty International, Indonesia: The War in Aceh, Journal Vol. 13 No 4 (C), Agustus 2001, Hal 28-32

⁶² Wawancara dengan Khairani Arifin, SH, M.Hum, di kediamannya di Banda Aceh

penggunaan metode *shock therapy* dan teror yang bertujuan untuk meneyiptakan rasa takut pada masyarakat. Sehingga mereka menarik dukungannya atas Gerakan Aceh Merdeka. Hal ini dapat dilihat pada mayat-mayat korban penculikan dan pembunuhan yang sengaja diletakkan di tempat-tempat yang dapat terlihat dengan mudah oleh orang banyak.⁶³ Menurut Khairani Arifin, demikian juga dengan peristiwa kekerasan seksual atas perempuan korban yang dikatakan berafiliasi dengan GAM.

“Perkosaan dijadikan isu untuk menebar teror. Saya menemukan peristiwa di Aceh Timur, dimana si korban sebenarnya tidak diperkosa. Namun tentara sengaja menyebarkan isu bahwa ia diperkosa, untuk meneyiptakan rasa takut,” kata Khairani.

e. Dampak Peristiwa Kekerasan Seksual pada Korban, keluarga, dan masyarakat sekitarnya

a. Dampak Sosial, Fisik dan Psikologis peristiwa KS pada Korban

Dalam informasi dari pangkalan data KKR Aceh, ada korban mengaku sempat tidak diterima oleh orang yang masih termasuk keluarga.

“Jangan datang ke sini, nanti gara-gara kalian ayah kami ditangkap aparat!” adalah contoh salah satu kalimat yang dikeluarkan kemenakan korban Ibu RH binti T. Sementara mertuanya mengatakan bahwa ia enggan menanggung biaya makan cucu-cucunya. Katanya, “Untuk apa lagi cucu, anak kandungku sendiri pun sudah tidak ada.”⁶⁴

Dalam wawancara di kediaman Ibu AS, Ibu RH binti T mengatakan bahwa kata-kata tersebut dilontarkan keluarganya karena mereka kuatir akibat buruk yang dapat terjadi atas diri mereka.⁶⁵

Pemilik rumah tempat diadakannya pertemuan dan wawancara, Ibu AS, juga mengalami “diabaikan” oleh kawan dan sanak sedusun. Saat ia keluar dari tahanan di Pos Cot Cekok, Ibu AS terpaksa tidur di Gedung PKK, karena tidak ada sanak saudara yang mau menerimanya. Itu termasuk ayah kandungnya sendiri.

⁶³ Komnas HAM, *Ringkasan Eksekutif Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat di Aceh: peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis lainnya*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta: 2018. Hal 3

⁶⁴ Informasi dalam pangkalan data KKR Aceh

⁶⁵ Wawancara di kediaman Ibu AS, Blang Pandak 26 September 2020

Namun sikap tersebut tidak ada kaitannya dengan kekerasan seksual yang dialami korban. Seperti yang dikatakan Pak Keuchik Tgk Banta Lida, penyiksaan fisik, termasuk kekerasan seksual yang menimpa korban dianggap termasuk dalam kualifikasi “situasi gawat darurat peperangan.”

Bukan sesuatu yang termasuk aib, atau noda. Dampak sosial yang cukup berat yang dirasakan para korban, lebih banyak berkaitan langsung dengan rasa takut yang dirasakan penduduk Blang Pandak. Penduduk memilih untuk tidak terlalu terlibat dengan korban mau pun keluarganya karena khawatir akan ditangkap atau dianiaya aparat.

Di Aceh Utara, korban perkosaan di Alue Lhok melaporkan bahwa masih banyak anggota masyarakat yang memandang sinis pada mereka. Fakta bahwa korban terlihat kerap mendatangi Pos dijadikan dasar anggapan bahwa mereka memiliki hubungan dekat dengan aparat.⁶⁶

Seorang perempuan muda yang bekerja sebagai jurnalis di Banda Aceh menuturkan bahwa penduduk kampungnya di Aceh Timur menandai hadirnya perempuan ke pos aparat sebagai sesuatu yang berkonotasi negatif.

“Setiap kali sebuah Pos berdiri, tak berapa lama akan berdatangan perempuan-perempuan ke sana. Kami, penduduk sekitar, tak pernah tahu, dari mana asal perempuan-perempuan itu. Orang kampung merasa bahwa kehadiran mereka tidak membawa kebaikan,” katanya.⁶⁷

Di Alue Lhok, para aktivis LSM yang mewawancarai dan mengambil pernyataan korban, dianggap sebagai tanda bahwa para korban akan mendapat bantuan dana. Ada semacam kecemburuan terhadap para korban, yang diungkapkan anggota masyarakat dusunnya secara gamblang.⁶⁸

Seperti yang dituturkan Ibu NR, salah satu korban perkosaan di Bukit Hagu:

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Badriyah RPuK

⁶⁷ Wawancara dengan IH, warga Aceh Timur

⁶⁸ Wawancara via telepon dengan Mellyan Cutkeumala Nyakman, M.Ag, 12 November 2020

“Dulu ada saya dengar orang-orang kampung bilang, ‘*enak ya, udah main-main dengan tentara, dapat bantuan, lagi*,’” ceritanya.⁶⁹ Stigma yang sama melekat juga pada para korban KS di Nisam Antara. Secara umum mereka disebut “*inong tentra*.”

Sikap masyarakat tersebut menambah tekanan yang dirasakan oleh para korban. Ibu Nurjubah dari JaRI bahkan mengatakan bahwa para korban sempat merasa sangat kotor. Sehingga mereka menginginkan untuk dimandikan secara simbolis oleh seorang teungku pemimpin pesantren, untuk mengembalikan kesucian mereka.⁷⁰

Beberapa korban beruntung memiliki pasangan yang memiliki sikap positif, bersedia menerima kembali korban sebagai istri, dan mendukung proses pemulihan psikologis mereka. Korban lain tidak seberuntung itu.

Ibu NRT misalnya, korban dari Nisam. Ia dua kali diperkosa tentara di dalam rumahnya sendiri. Perbuatan itu dilakukan di depan suaminya, yang tak bisa berbuat apa-apa. Walau pun NRT melawan sekuat tenaga dan menunjukkan bahwa ia tak sudi diperlakukan demikian, kejadian tersebut berdampak besar pada sang suami. Lelaki itu tak banyak bicara lagi dengan istrinya, juga tak pernah lagi menyentuh sang istri. Setelah kejadian perkosaan kedua, sang suami menceraikannya. Saat itu NRT baru berusia 14 tahun.⁷¹

Diceraikan bukan satu-satunya dampak negatif. NRT juga terpaksa merantau ke Malaysia karena tak tahan mendengar omongan orang tentang dirinya. Ia disebut “*lonte tentara*”. Ibu Badriyah mengungkapkan, bahwa sebutan itu mulanya datang dari sesama kaum perempuan. Kenyataan bahwa NRT dipaksa melayani para pemerkosa itu, dan bahwa ia melawan, yang juga disaksikan oleh suaminya, tak punya pengaruh apa-apa untuk mengubah pendapat mereka.⁷²

Di Malaysia, NRT menikah dibawah tangan (menikah siri) dengan sesama warga Aceh. Pernikahan ini berakhir pada perceraian juga. Saat ini, NRT telah menikah kembali dengan seseorang. Statusnya sebagai istri kedua.

⁶⁹ Nashrun Marzuki (ed), *Kebenaran untuk anak cucu*, Koalisi NGO HAM, Banda Aceh: 2012. Hal 34

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Nurjubah JaRI, Lhokseumawe dan Banda Aceh, Oktober-November 2020

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Badriyah RPuK, Lhokseumawe

⁷² Ibid

Bagi sebagian korban, menikah merupakan sebuah solusi. Seperti yang dituturkan Ibu RU, penyintas dari Nisam Antara: “Saya putuskan untuk menikah kembali dengan Nur, suami kedua saya, karena saya memikirkan nasib kelima anak saya yang sudah yatim. Saya tidak peduli bahwa Nur adalah anggota GAM,” tuturnya.⁷³

Para korban di Blang Pandak menceritakan bahwa selama mereka kena wajib lapor setiap hari, mereka tak bisa bekerja di sawah atau di kebun. Pos tempat mereka harus melapor cukup jauh letaknya. Pulang pergi menghabiskan waktu seharian. Belum lagi selama di Pos mereka mendapat hajaran. Tak ada waktu lagi untuk mengurus sawah atau kebun mereka.

Akibatnya, dari segi ekonomi mereka sangat dirugikan. Penghasilan mereka lenyap. Selain itu, anak-anak mereka telantar. Sebagian mendapat bantuan dari orangtua dan sanak saudara masing-masing, namun tak banyak. Anak-anak korban yang telantar selama orangtuanya tak ada, sebagian besar juga mengalami kekerasan. Baik itu verbal mau pun fisik.

Perundungan adalah bentuk kekerasan yang kerap dialami anak korban. Anak Ibu RH sering ditakut-takuti akan ditangkap dan dibunuh, karena ayahnya anggota GAM. Ia juga mengalami perbedaan perlakuan dari teman-temannya di sekolah. Perundungan pada anak-anak Ibu RH bahkan datang dari sanak saudaranya sendiri.

“Pada saat itu semua orang cari selamat sendiri,” ujar Ibu AS, menanggapi pertanyaan Tim. “Agar bisa hidup, kami harus pandai-pandai memutar otak dan membawa diri.”

Deraan fisik dan mental yang menimpa para perempuan penyintas ini meninggalkan bekas yang dalam. Baik pada jasmani mau pun rohani korban.

Ibu MP misalnya, penyintas peristiwa perkosaan. Ia diperkosa berkali-kali di Pos Alue Papeun, Aceh Utara, hingga kandung kemihnya robek. Tak dapat direkonstruksi.

“Sampai sekarang, ia harus mengenakan popok sekali pakai,” tutur Ibu Badriyah, pendamping korban. “Seharusnya popok itu diganti sering-sering. Namun ibu MP tak

⁷³ Informasi pangkalan data KKR Aceh

bisa berbuat begitu, karena harga popok seperti itu cukup mahal. Akibatnya, dari jarak satu setengah meter sekali pun sudah tercium bau urine yang cukup menyengat.”⁷⁴

Sebagian besar korban juga mengeluhkan kemunduran daya lihat setelah kepala mereka kena hantaman benda tumpul semasa dalam penyiksaan. Rasa nyeri di bagian-bagian tubuh yang menjadi sasaran penyiksaan, kehilangan kemampuan konsentrasi, sampai pada gangguan tidur.

Bukan hanya kerusakan fisik yang diderita korban. Ibu Badriyah menuturkan bahwa setelah peristiwa perkosaan itu, kepribadian Ibu MP berubah sama sekali. “Tadinya ia cenderung pendiam, tidak suka ribut-ribut. Sikapnya pasrah, tidak macam-macam. Tapi sekarang ini, Ibu MP akan duluan angkat bicara bila ada sesuatu yang menurutnya tak sesuai. Suaranya pun keras. Misalnya, baru-baru ini kami dari RPuK mengadakan program pemulihan dengan cara pelatihan menulis. Kami tidak menyertakan Ibu MP karena beliau tidak begitu pandai membaca dan menulis. Nah, beliau tidak terima. Ia melapor ke sana kemari menyatakan ketidakpuasannya. Ujung-ujungnya kami masukkan juga beliau ke dalam program, karena protes-protes keras yang dilancarkanya sudah mengganggu kenyamanan kawan-kawannya sekampung.”⁷⁵

Dua korban yang tengah mengandung pada saat kejadian, Ibu UM dari Aceh Utara dan Ibu RH dari Blang Pandak, mengaku bahwa saat lahir bayi mereka mengalami gangguan fisik. Bayi Ibu RH tidak bergerak dan tidak menangis selama satu jam setelah lahir. Bayi Ibu UM bahkan meninggal dunia tak lama setelah lahir, dengan kondisi seluruh tubuh lebam-lebam.

Ibu UM dari Aceh Utara mengalami perkosaan pada usia kehamilan tujuh bulan, sedangkan Ibu RH dari Pidie mengalami penyiksaan fisik. Usia kehamilannya lima bulan waktu itu.

f. Up date kondisi korban pada saat investigasi

1. Blang Pandak

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Badriyah RPuK, Lhokseumawe

⁷⁵ Ibid

Dari korban yang hadir di rumah Ibu AS, secara fisik nampak para ibu ini tidak lagi menyimpan bekas siksaan yang pernah mereka alami. Bahkan Ibu AS, yang sempat ditahan dan disiksa selama sebulan, menunjukkan vitalitas fisik yang baik.

Secara psikologis, kesemua peserta pertemuan mengatakan bahwa mereka sudah bisa melampaui masa-masa genting saat kejiwaan mereka sangat rentan. Namun, pekerjaan mereka rata-rata buruh tani, dengan penghasilan tidak tentu. Sehingga mereka semua sangat membutuhkan manfaat ekonomi.

2. Nisam Antara

Di Nisam, korban tidak berhasil ditemui oleh investigator. Data up date mengenai korban diperoleh dari LSM pendamping, RPuK. Dalam hal ini, Ibu Badriyah.

Dari pembicaraan dengan Ibu Badriyah, satu korban atas nama Ibu MP mengalami dampak menerus dari peristiwa perkosaan yang menimpanya. Karena kandung kemihnya rusak permanen, maka urinenya terus menerus keluar. Ia juga mengalami gangguan psikologis.

Tidak terlacak apakah semua korban memiliki catatan kependudukan yang rapi (memiliki KTP, Kartu Keluarga dan/atau Surat Nikah).

3. Rumah Geudong

Korban dari Rumah Geudong yang bisa ditemui adalah RS. Kondisi fisiknya nampak seperti mengalami problem kesehatan. Ia mengaku kadang-kadang mengalami sakit kepala, juga sakit perut. Saat bicara dengan investigator, RS nampak gelisah, tanpa sebab yang pasti.

Rumah RS berlantai tanah, dan karena sebagian atapnya diterbangkan angin ribut maka bila hujan lantai rumahnya berubah menjadi lumpur.

Pada saat ini, RS telah menikah dan memiliki tiga orang anak. Ia memiliki dokumen kependudukan.

4. Alue Lhok

Korban di Alue Lhok tidak berhasil ditemui. Pendamping dari LSM sangat menjaga privasi mereka. Menurut pendamping, kondisi psikologis korban sangat rentan. Mereka, kata pendamping, sudah letih menjawab pertanyaan, dan menolak untuk bekerja sama lagi.

Ibu Nurjubah dari JaRI mengatakan bahwa para korban ini umumnya membutuhkan pemulihan psikologis dan bantuan manfaat ekonomi. Belum terlacak apakah mereka memiliki dokumen kependudukan yang lengkap.

5. Aceh Besar

Ketiga korban yang berhasil ditemui telah menikah, dan memiliki tempat tinggal. Korban atas nama ERL memiliki kedai kelontong menjual keperluan sehari-hari. Korban ANDR sudah menikah kembali. Korban WNT sudah menikah lagi, namun pernikahannya tidak memiliki dokumen resmi.

Reparasi yang diharapkan

Umumnya korban mengharapkan kehadiran Pemerintah dalam memenuhi hak mereka atas kenyamanan, kesejahteraan ekonomi, pendidikan dan jaminan masa tua. Sebagian besar korban menyebutkan bahwa bagian reparasi yang sangat mereka harapkan adalah bea siswa pendidikan bagi anak-anak mereka.

Korban yang mengalami masalah kesehatan terkait apa yang terjadi atas diri mereka semasa konflik, berharap diberi jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan yang menyeluruh, termasuk akses pada fasilitas bedah, rekonstruksi medis, atau terapi yang diperlukan untuk membantu pemulihan kondisi fisik mereka.

Semua korban mengharapkan jaminan hari tua. Selain usia sudah berangkat uzur, siksaan fisik yang mereka alami saat muda telah meninggalkan bekas berupa berbagai cacat dan kelemahan fisik. Akibatnya mereka tak bisa lagi menggarap sawah atau kebun, yang dulu merupakan sumber penghidupan mereka. Sembilan puluh persen korban masuk dalam kriteria miskin, namun belum semua memperoleh program bantuan bagi keluarga miskin dari Pemerintah.

Khusus bagi korban atas nama RS, saat Tim menemuinya di rumahnya, atap dapur serta sebagian atap ruang tengah rumahnya bolong, sengnya lenyap dibawa angin ribut. RS terpaksa memindahkan peralatan masaknya ke satu dari dua kamar di rumahnya. Bagian atap ruang tengah yang hilang sementara ditutup dengan lembaran plastik besar (di Aceh biasa disebut terpal, walau pun bukan terbuat dari kain tebal *tarpauline* seperti yang biasa digunakan militer). Lembaran tersebut tidak cukup besar sehingga ada bagian yang masih terbuka. Kita bisa melihat langit dari bagian yang terbuka tersebut. Lantai rumah RS juga masih terbuat dari tanah, sehingga ketika angin puyuh dan hujan datang lantai rumahnya berubah menjadi lumpur. RS berharap ia

dibantu memperbaiki kondisi ini agar keluarganya bisa hidup lebih nyaman, tidak selalu cemas bila hujan datang.

Harapan reparasi yang agak berbeda diutarakan korban perkosaan di Alue Lhok. Yaitu ingin dimandikan oleh teungku dari pesantren. Korban merasa diri mereka kotor, dan menginginkan sesuatu yang dapat menyimbolkan pembersihan diri mereka, menjadi suci kembali.

Kearifan-kearifan lokal serupa ini membuktikan bahwa bagi korban, reparasi dan pemulihan tidak mutlak berarti materi. Kenyamanan serta kemungkinan untuk kembali dapat menerima diri sendiri sebenarnya merupakan reparasi yang paling berharga bagi korban perkosaan.

Catatan dibuang sayang

Bagian ini berisi ringkasan peristiwa kawin paksa di Desa Curek, Krueng Sabee, Aceh Jaya. Tim memasukkannya ke dalam laporan karena kawin paksa, sebuah bentuk kekerasan seksual, merupakan peristiwa nyata yang terjadi di Aceh selama konflik.

Sebagian orang menganggap bahwa peristiwa seperti ini tidak termasuk ke dalam kekerasan pada perempuan. Karena, bukankah korban dinikahi? Kalau dia tidak mau, mengapa dia kawin juga? Bukankah mudah untuk menolak, karena kawin memerlukan wali dan saksi?

Ada banyak anasir pada sebuah peristiwa kawin paksa, yang tidak dipahami umum. Apa yang menimpa EM adalah contoh yang sangat bagus sebagai ilustrasi, betapa rumitnya kasus serupa ini.

Aku cinta sama kamu, kamu harus kawin denganku

Ditahun 2003, pasukan TNI Infanteri Raider Yonif 744/Satya Yudha Bhakti tiba di Calang, Aceh Jaya (saat itu masih Kabupaten Aceh Barat). Pasukan elit dengan spesialisasi penumpasan Gerakan Pengacau Keamanan ini dahulu bermarkas di Dili. Sejak 1999 Yonif 744 bermarkas di NTT.

Pasukan ini membuat pos di Desa Curek, wilayah Krueng Sabee. Masyarakat Krueng Sabee masih mengingat nama beberapa tentara yang bertugas di sana, juga kebiasaan mereka. Disebutkan, salah satunya sangat suka berburu babi hutan. Lainnya diingat karena merupakan Komandan di Pos itu.

Namun nama Sersan Dua Budi Haryanto mengambil tempat tersendiri dalam deretan nama tentara yang pernah bertugas di sana.

Lelaki ini tersangkut mata. Jatuh hati pada seorang perempuan warga Curek. Sial bagi Serda Budi, EM, si pujaan, sudah menikah. Suaminya yang anggota GAM tengah bergerilya di hutan-hutan Krueng Sabee.

Tak kurang akal, Serda BH menggunakan “pengaruhnya” sebagai militer. Ia berhasil membuat sanak saudara EM memaksa perempuan itu menandatangani surat pasah (cerai) untuk suaminya, Basyirun alias Roni. Segala protes perempuan itu masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Malam itu juga wali EM mengawinkan perempuan itu dengan Serda BH.

Setelah berhasil kawin, setiap hari Serda BH meminta “haknya”. Ia lakukan itu selalu siang hari, karena sebagai sersan yang baru lulus sebenarnya ia tak bisa kawin dulu. Bila komandannya tahu, nasibnya pasti suram. Tapi Serda BH beruntung. Bukan saja berhasil mengawini EM, ia juga berhasil membawa perempuan itu pindah ke tempat tugas barunya. Kalimantan.

Di sana, Serda BH berubah. Mungkin lupa bahwa dulu dia harus seruduk sana sini untuk memenangkan EM. Tangannya sering mampir ke wajah manis istrinya itu. Meski sang istri sudah melahirkan seorang putra baginya. Sikap Serda BH tidak membaik.

Akhirnya abang kandung EM mengiriminya tiket untuk pulang ke Aceh. Serda BH tak bisa mencari alasan lagi untuk menahan istrinya tetap di Kalimantan.

Sampai di Curek kembali, bukan peluk kangen yang diterima EM dari sanak sekampung. Namun cibiran. Disebut pengkhianat, perempuan yang bisa dibeli, tak setia pada suami. Wali yang menikahkannya tidak berusaha mengatakan, bahwa EM menikah dibawah ancaman.

“Saya tidak peduli,” kata EM. “Biar saja mereka bicara. Yang penting saya sudah kembali ke Aceh.”

Saat ini yang diinginkannya hanya bertemu dengan putranya yang ditinggalkannya di Kalimantan. “Saya sering telepon dia. Tapi, itu saya lakukan siang hari, kalau ayahnya sedang tidak ada,” cerita EM. Tentang perasaannya pada Serda BH, EM mengaku tak menyimpan luka.

“Bagaimana pun, dia memberi saya seorang anak,” katanya. “Saya maafkan dia. Saya hanya ingin bertemu anak saya.”

V. Penutup

Agak pelik mengulik konflik dan pelanggaran HAM di Aceh. Padahal perdamaian telah disepakati. Sudah lama pun diteken MoU. Mereka yang dulu berseteru, duduk semeja kini. Bahkan dengan damai, riang gembira, saling berbagi kuasa.

Korban? Ternyata mereka masih ada yang memendam luka. Derita mereka dan keluarga seolah tersimpan saja dalam berbagai dokumen program pemulihan. Hak-hak mereka belum juga dapat dipenuhi. Seakan mereka makin jauh dari agenda penguasa.

Transisi menuju perdamaian yang hakiki masih terganjal kepentingan yang tak sama antara para pemburu kuasa. Namun, suara korban harus didengar. Sejarah harus disampaikan. Bukan untuk memelihara dendam, tetapi untuk pembelajaran bagi generasi masa datang.

Kekerasan seksual adalah kejahatan yang lumrah terjadi dalam sebuah peperangan. Namun teror dan kerusakan yang dihasilkannya sangat efektif, mempengaruhi bukan hanya kondisi fisik dan psikis korban, tetapi juga keluarga, masyarakat sekitar, bahkan dapat menghancurkan moral seluruh bangsa.

Dimensi berlapis kekerasan seksual membuat pelanggaran ini sulit untuk direkam, sulit diajukan ke Pengadilan. Dalam skema pemulihan yang dimiliki Pemerintah RI, korban kekerasan seksual bahkan tidak termasuk ke dalam daftar mereka yang mendapat kompensasi dari kerugian yang dialami. Padahal korban bukan hanya harus

hidup dengan efek kerusakan fisik yang permanen, namun juga dengan stigma negatif yang dicorengkan peristiwa itu kepada nama-nama mereka.

Karena itu penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual seharusnya mendapat perhatian sama besar, atau bahkan lebih besar, dengan kasus pelanggaran HAM lainnya.

Dari apa yang teramati dalam investigasi ini, didapat beberapa poin yang patut diperhatikan. Antara lain:

- Kearifan lokal perlu dipertimbangkan untuk kegiatan reparasi bagi korban. Karena korban tidak hanya sekedar mengharap bantuan berupa materi, namun lebih pada pemulihan psikologis. Hal ini seperti yang diungkapkan korban dari Alue Lhok, yang berharap dapat “disucikan kembali” dengan cara “dimandikan” oleh seorang ulama yang dipercaya.
- Jaminan kesehatan sangat penting bagi korban KS. Peristiwa KS yang mereka alami meninggalkan gangguan fisik sekaligus psikologis yang berat. Pemerintah RI harus hadir untuk mereka, dengan memberikan jaminan pengobatan yang dapat diakses dengan mudah oleh korban, dan berlaku seumur hidup.
- Dari apa yang disampaikan pendamping, dokumen kependudukan masih menjadi masalah bagi beberapa korban. Pendamping menyampaikan bahwa mereka membutuhkan waktu untuk mengumpulkan kembali data dari korban-korban yang tidak bisa (dilarang) ditemui investigator. Sebaiknya, update kondisi korban yang berkaitan dengan dokumen kependudukan, juga pekerjaan dan penghasilan saat ini yang berguna untuk mendekatkan pemenuhan hak-hak sebagai warga negara, dimintakan kembali datanya pada Pendamping saja.
- Setiap tahun, bangsa Jerman memperingati tragedi kemanusiaan Holocaust, sebagai pengingat pedih bagi generasi penerusnya agar tidak mengulangi kesalahan yang begitu mengerikan.
- Bangsa Jepang membiarkan *Genbaku Dome* (Gedung Kubah Genbaku) di Hiroshima tetap pada kondisi remuk oleh bom atom yang dijatuhkan tentara Sekutu. Gedung di *Peace Memorial Park* (Taman Peringatan Perdamaian) itu kini sudah tercatat sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Setiap tahun pada

tanggal 6 Agustus pukul delapan pagi, sirene berbunyi di kota Hiroshima dan Nagasaki. Tak peduli kegiatan apa yang sedang dilakukan, warga segera akan berdiri terpaku di tempatnya, menundukkan pandang, mengheningkan cipta. Mengenang kejadian pilu yang menelan 129.000 nyawa rakyat tak berdosa. Bercermin pada pengalaman bangsa lain, maka untuk kepentingan memelihara ingatan dan sejarah, sebaiknya dibangun semacam batu peringatan di titik-titik Pos sepanjang Jalan KKA, Pos di Lhok Glap, dan beberapa titik lain. Pengakuan bahwa peristiwa-peristiwa memilukan yang menimpa para korban benar-benar pernah terjadi, merupakan langkah awal kepada pemulihan. Sekali lagi, bukan untuk memelihara dendam dan luka. Melainkan untuk menjadi pelajaran bagi generasi penerus.

11/2020